



**DISWAY**

Oleh: Dahlan Iskan



## Perjudian Besar

**K**ALAU ada diskusi terbatas yang membahas apakah pasal 33 UUD 1945 masih relevan untuk diterapkan di zaman ini, saya mau hadir. Saya ingin menjadi pendengar aktifnya. Lalu menulis laporan dari diskusi itu untuk Disway.

Baiknya diskusi itu di kampus. Di fakultas ekonomi dan bisnis. Dua ahli bisa diminta jadi panelis: yang optimistis bahwa pasal itu masih relevan dan yang punya model alternatif untuk kemajuan Indonesia.

Secara psikologis, pasal 33 itu sangat memikat hati rakyat. Istilah "asas ekonomi kekeluargaan" di pasal itu juga sangat cocok dengan semangat solidaritas, kebersamaan, kerukunan, dan keadilan.

■ Bersambung ke Hal.2



LAPORAN KEUANGAN MASJID RAYA- GORONTALO ISLAMIC CENTRE	
Saldo tanggal 13 Maret 2024	
Bank Muamalat	Rp 2.981.088.175
Bank BSG	Rp 255.174.632
Total Saldo	Rp 3.236.182.807
Totol Perhitungan Saldo setelah dikurangi pengeluaran selang 7: 1/19 13 Maret 2024	Rp 97.371.228

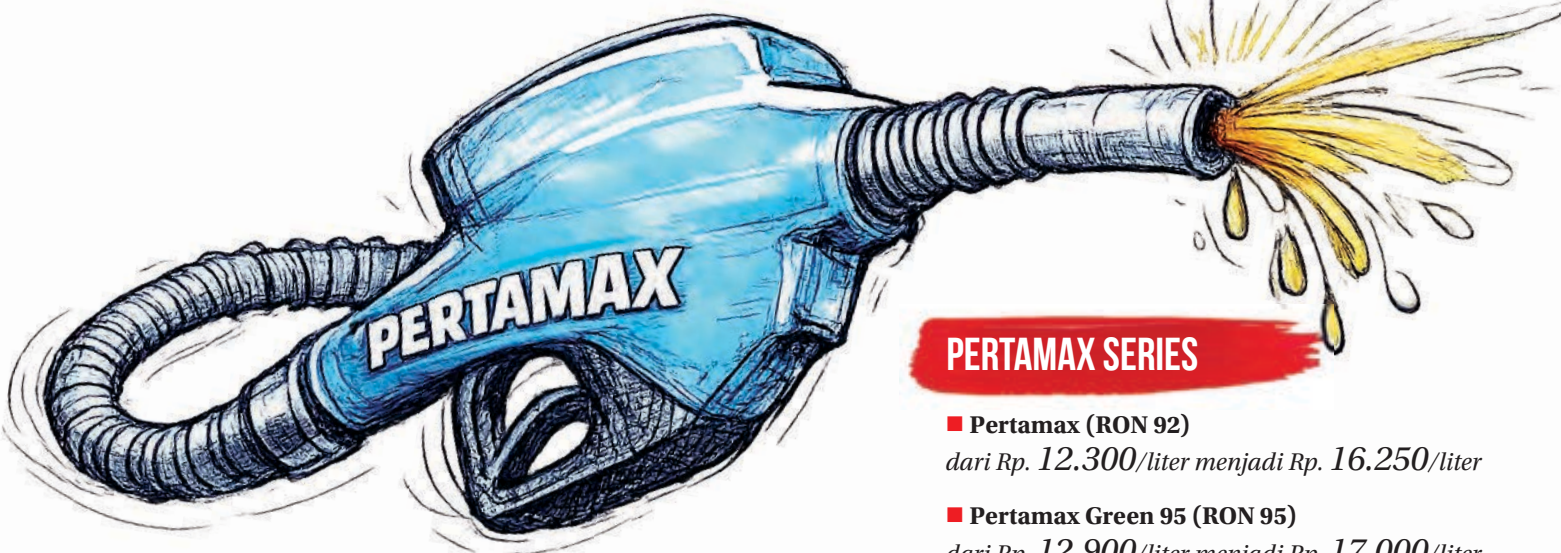
# DAERAH TAK MAMPU GAJI PPPK

## Kemendagri Siapkan Skema Top-Up TKD

**JAKARTA-GP-** Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat menyiapkan skema top-up Transfer ke Daerah (TKD) bagi sekitar 39 daerah yang benar-benar tidak mampu membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal itu disampaikan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan sejumlah kepala daerah di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (8/6). Tito awalnya menjelaskan Kemendagri menerima banyak keluhan daerah-daerah yang tidak mampu membayar PPPK.

■ Bersambung ke Hal.2



### PERTAMAX SERIES

#### ■ Pertamax (RON 92)

dari Rp. 12.300/liter menjadi Rp. 16.250/liter

#### ■ Pertamax Green 95 (RON 95)

dari Rp. 12.900/liter menjadi Rp. 17.000/liter.

#### ■ Pertamax Turbo (RON 98)

Rp. 20.750/liter (tetap)

### DEX SERIES

#### ■ Dexlite (CN 51)

Rp. 23.000/liter (tetap)

#### ■ Pertamina Dex (CN 53)

Rp. 24.800/liter (tetap)

## HARGA PERTAMAX NAIK

**JAKARTA -GP-** Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga jual BBM non subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green. Mulai Rabu 10 Juni, harga Pertamax (RON 92) naik menjadi Rp 16.250/liter, dan Pertamax Green naik menjadi Rp 17.000/liter. Penyesuaian harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.

■ Bersambung ke Hal.2

## OTT BUPATI Suap Proyek, Rp 1,9 M Disita

**JAKARTA -** Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Muara Enim periode 2025-2030, Edison. Dalam perkara tersebut, KPK menduga terjadi praktik suap dan setoran proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, khususnya terkait pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).

■ Bersambung ke Hal.2



BUPATI Muara Enim Edison resmi ditahan usai diperiksa di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

## WAGUB IDAH SYAHIDAH RH HADIRI KICK OFF UJI KEAMANAN PANGAN JAJANAN SEKOLAH

# Uji 1.600 Sampel Jajanan Sekolah, Gorontalo Targetkan Rekor MURI

(FOTO: FADLY/ DISKOMINFOTIK)  
**WAGUB** Idah Syahidah RH bersama Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM RI Agus Yudi Prayudanan, Kepala BPOM Gorontalo, Kepala Dinas Kesehatan, serta Kwarda Gorontalo hadir pada pelaksanaan Kick off Uji Keamanan Pangan Jajanan Sekolah di MIN 1 Kota Gorontalo, Selasa (9/6).



**PROVINSI** Gorontalo menargetkan pemecahan Rekor MURI melalui kegiatan uji keamanan pangan jajanan anak sekolah dengan jumlah sampel terbanyak. Sebanyak 1.600 sampel jajanan dari 100 sekolah di seluruh kabupaten/kota akan diuji dalam program yang digagas Satuan Karya Pramuka Pengawas Obat dan Makanan (SAKA POM) Gorontalo bersama Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Gorontalo.

**K**EGIATAN tersebut ditandai dengan pelaksanaan Kick Off yang dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie, dan dihadiri langsung Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM RI Agus Yudi Prayudanan, bertempat di MIN 1 Kota Gorontalo, Selasa (9/6/2026).

Kepala Balai Besar POM di Gorontalo Lintang Purba Jaya menjelaskan bahwa, kegiatan

pemecahan rekor MURI ini akan menjadi bagian dari rangkaian roadshow keamanan pangan yang berlangsung selama 60 hari ke depan.

Dalam pelaksanaannya, anggota Saka POM akan berperan sebagai Junior Inspector atau inspektur muda yang dilibatkan dalam pengawasan pangan berbasis edukasi di sekolah-sekolah.

■ Bersambung ke Hal.2



## Daerah Tak Mampu Gaji PPPK

*dari halaman 1*

Namun, Kemendagri tidak menerima informasi begitu saja dan memelototi postur anggaran daerah-daerah itu. “Namun kemudian kita melakukan pendampingan, pendampingan kita juga, mohon maaf, tidak terima begitu saja informasi. Kita melihat dan kita detail melihat apa postur anggarannya, dan setelah dilihat postur anggarannya, ternyata banyak daerah yang mampu,” kata dia. Ia mencontohkan NTT yang awalnya mengeluh tidak bisa membayar PPPK, namun setelah didampingi Kemendagri, akhirnya ada anggaran yang dialihkan. Tito meminta kepala daerah untuk terlebih dahulu melihat rincian pos anggaran sebelum

menyerah. “Contoh Sulawesi Tengah, ini Pak Gubernur, Bapak punya anggaran hibah Rp 120 miliar Pak. Kami sudah melihat, saya lihat dari sistem, di anggaran sistem anggaran, Rp 120 miliar ini bisa dikurangi sebetulnya untuk membayar PPPK, hibahnya. Jadi hal-hal yang tidak efisien bisa untuk diefisiensikan. Nah ini tolong dikerjakan dulu, jangan menyerah dulu, karena kalau yang menyerah pasti kami pelototi,” katanya. Namun, ia mengatakan memang ada daerah yang memang sudah tidak mampu. Ia mencontohkan Kabupaten Tojo Una-Una dengan porsi belanja pegawai mencapai 56,65 persen, Kabupaten Buol sekitar 51 persen, Kabupaten Donggala 53,9 persen, serta Kabupaten Sigi yang mencapai 60 persen. Tito mengatakan daerah yang

benar-benar tidak mampu membayar perlu dicarikan solusi. “Kalau enggak salah kita hitung 39 ya? 39 daerah yang perlu kita pikirkan mungkin mereka kalau di PAD juga akan berat, sehingga mungkin perlu ditop-up melalui TKD,” katanya. Tito kembali mengingatkan kepala daerah untuk mengevaluasi pos-pos anggaran yang tidak efisien. Ia meminta kepala daerah tidak menerima saja informasi dari jajaran. “Tapi kami melakukan pendampingan tiap minggu. Tiap minggu kami lakukan semua daerah yang kami anggap itu akan sulit mereka. Kemudian yang berikutnya, artinya perlu dicarikan jalan keluar yang memang sudah menyerah. Memang nggak bisa lagi, harus perlu dibantu untuk top-up,” kata dia. **(net)**

## Harga Pertamina Naik

*dari halaman 1*

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM non subsidi mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat. “Penyesuaian harga Pertamina

dan Pertamina Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah,” ujar Roberth dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6/2026). Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal,” sambung Roberth. Pertamina Patra Niaga

## Perjudian Besar

*dari halaman 1*

Tetapi perasaan dan pikiran tidak selalu sejalan. Perasaan menyangkut hati dan rasa. Pikiran menyangkut otak dan logika. Kadang perasaan lebih dimenangkan daripada otak. Ada pula kelompok yang lebih memenangkan otak daripada sebaliknya. Saya tertarik pada “asbabun nuzul” –keadaan di saat pasal 33 itu dilahirkan. Iklim lahirnya pasal 33 itu adalah iklim penjajahan. Kebetulan penjajah kita adalah Belanda yang amat kapitalistis –Yahudinya bangsa Eropa. Pada zaman itu kapitalisme sedang mendapat tantangan yang hebat dari sosialisme. Semacam “aksi kapitalisme” yang mendapat reaksi sosialisme. Di negara-negara jajahan, gerakan anti kapitalisme sangat tinggi. Kita punya tokoh sekaliber Tan Malaka –tokoh gerakan bawah tanah yang diakui sampai Malaysia, Burma, Kamboja, Vietnam, sampai Filipina. Tan Malaka, kelahiran Sumatera Barat, terus berkeliling negara-negara itu untuk menggerakkan sosialisme di mana-mana.

Di Indonesia tokoh-tokoh pemuda yang menggerakkan kebangkitan kemerdekaan harus diakui adalah mereka yang dari golongan kiri –kiri luar sosialis maupun kiri dalamnya. Pasal 33 UUD 1945 lahir dari iklim gerakan pemikiran seperti itu. Kalau masyarakat kita miskin luar biasa --termasuk miskin pengetahuan dan pandangan. Masalahnya: kita belum pernah punya kesempatan mempraktikkan Pasal 33 itu secara utuh. Setelah merdeka di tahun 1945 perhatian kita habis untuk berjuang mendapat pengakuan internasional –Belanda dan sekutunya tidak mau mengakui kemerdekaan itu. Baru di tahun 1949 Belanda mengakui. Setelah itu terjadi

pemberontakan –demi pemberontakan. Lalu sibuk menyelenggarakan pemilu pertama di tahun 1955. Pemilunya dua kali pula. Tanggal 29 September pemilu untuk memilih anggota DPR. Tiga bulan kemudian, 15 Desember, pemilu lagi untuk memilih anggota Konstituante. Waktu itu kita punya UUD Sementara tahun 1950, yang mengamankan agar Indonesia punya Konstituante yang bertugas khusus untuk membentuk UUD Indonesia. Anggota Konstituante harus dipilih lewat Pemilu. Maka tahun 1955 itu kita melaksanakan dua pemilu. Hasilnya persis sama. Urutan perolehan suaranya: Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Bung Karno, Partai Masyumi (partai Islam modernis), Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sidang-sidang Konstituante sendiri mulai berlangsung tahun 1956 di Bandung. Yakni di gedung Asia Afrika. Di gedung inilah di tahun 1955 berlangsung KTT Asia Afrika yang terkenal itu. Sidang-sidang Konstituante berlangsung alot selama hampir tiga tahun. Terjadi perang ideologi yang sangat keras antara agama, nasionalis, dan komunis. Akhirnya Bung Karno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959: kembali pakai UUD 1945. Pembahasan UUD baru belum sampai ke asas ekonomi. Pembahasan masih berkutat di dasar negara. Dengan Dekrit Presiden maka pasal 33 juga ikut diberlakukan kembali. Pun setelah dekrit belum ada waktu untuk menerapkan pasal 33 itu. Penggagas pasal itu, Dr Mohammad Hatta, mengundurkan diri dari jabatan wapres. Hatta terlibat konflik dengan Bung Karno –yang dianggapnya otoriter. Setelah itu perhatian nasional fokus ke merebut Irian Barat

agar kembali ke pangkuan ibu pertiwi –seperti yang akan dilakukan Tiongkok atas Taiwan. Berhasil. Irian Barat kembali ke pangkuan. Tapi kita segera terlibat konfrontasi dengan Malaysia. Asas ekonomi kita pun menjadi ekonomi terpinjin. Pasal 33 tidak juga dapat slot waktu untuk dicoba. Mendekati 1965 ekonomi Indonesia nyaris bangkrut. Kemiskinan meluas dan mendalam. Kelaparan di mana-mana sampai ke busung lapar. Setelah 1965, di awal Orde Barunya Pak Harto ekonomi kita diam-diam berasaskan liberalisme dan kapitalisme. Kemiskinan berkurang drastis. Pangan cukup. Sandang berlebih. Kita seperti lupa ada pasal 33 yang harus dilaksanakan. Pun setelah reformasi. Banyak pasal di UUD 1945 yang diubah, tapi pasal 33 tidak diubah, hanya ditambah dua ayat. Tidak ada juga perdebatan mengenai pasal itu. Seolah sikap pada umumnya: biarlah pasal 33 itu ada biar pun tidak pernah dilaksanakan. Berarti sudah lebih 50 tahun kita “melupakan” pasal itu. Dalam 50 tahun itu keadaan berubah total. Pun kebiasaan dan pola pikir. Ekosistem yang terbentuk sudah kapitalistik liberal. Ada yang melebihkannya dengan neoliberal. Lengkap dengan ikutannya: individualistis, koruptif dan hedonists. Maka apakah mungkin pasal 33 bisa dilaksanakan ketika ekosistemnya sudah jauh berubah dibanding ketika pasal itu dilahirkan. Sungguh menarik untuk didiskusikan secara dingin, jernih, tidak emosional, tidak baper, dan sepenuhnya berorientasi demi kemajuan Indonesia ke depan. Pemaksaan ke pasal 33 bisa saja merupakan perjudian besar. Mungkin akan berhasil. Mungkin justru sebaliknya. (\*)

## Suap Proyek, Rp 1,9 M Disita

*dari halaman 1*

KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, salah satunya Bupati Muara Enim, Edison. Serta tiga pihak lainnya, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani, Adi Triadi yang merupakan keponakan Bupati Edison, serta Marketing PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Taufik Ahmad Husein, menjelaskan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang diterima lembaga antirasuah. KPK menindaklanjuti dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Taufik mengungkapkan, pada Sabtu, 6 Juni 2026, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim, Abi Nurwardani (ABN), bertemu dengan Cory Erin Hardi (CRH) selaku pihak swasta dan marketing PT Millenium Solusi Abadi (MSA) di sebuah hotel di Jakarta. PT MSA merupakan supplier smart board ke PT My Icon Technology (MIT) yang mendapatkan proyek pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim Tahun Anggaran 2025. “Dalam pertemuan tersebut, ABN diduga menerima uang tunai sejumlah Rp 500 juta dari CRH,” kata Taufik Ahmad Husein dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/6). KPK menduga uang itu berkaitan dengan proyek pengadaan di Pemkab Muara Enim, sekaligus untuk menjaga relasi bisnis dengan pemerintah daerah. “Selain itu, di balik pemberian tersebut ada maksud dan tujuan, agar pihak swasta dapat menjaga “~hubungan baik ke depan”” dengan pemerintah daerah, sehingga mereka dapat memenangkan kembali dalam proyek-proyek daerah berikutnya,” ungkap Taufik. KPK juga menemukan dugaan adanya setoran dari sejumlah rekanan di lingkungan Pemkab Muara Enim atas perintah langsung Bupati Edison. Setoran itu disebut tidak hanya berasal dari proyek di Disdikbud, melainkan juga dari dinas lainnya. “Untuk menyamarkan aliran dana dari rekanan, para pihak menggunakan modus buka tutup rekening nominee ataupun melalui setoran secara cash (tunai),” jelasnya. Dalam pengaturannya, Abi Nurwardani diduga menjadi pengendali sejumlah rekening nominee tersebut.

### Uji 1.600 Sampel Jajanan...

*dari halaman 1*

“Selain menargetkan pengujian 1.600 sampel jajanan sekolah, program ini juga melibatkan sekitar 7.000 pelajar sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan pangan. Para pelajar diharapkan menjadi pelopor budaya konsumsi pangan yang aman, sehat, dan berkualitas di lingkungan sekolah maupun masyarakat,” kata Lintang. Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai upaya bersama untuk melindungi kesehatan anak-anak sekolah. Menurutnya, keamanan pangan jajanan sekolah memiliki peran penting dalam mendukung pemenuhan gizi anak sekaligus menunjang tumbuh kembang generasi muda yang sehat dan cerdas. “Edukasi kepada pedagang kantin maupun pedagang di sekitar

KPK menyebut dana yang masuk kemudian didistribusikan dengan persentase tertentu kepada sejumlah pihak di lingkungan pemerintah daerah. “ABN diduga mendistribusikan aliran uang dengan prosentase tertentu, yaitu sebesar 5 persen untuk Bupati, sebesar 3 persen untuk kepala dinas (kadis), dan sebesar 1 persen untuk PPK dan bendahara,” tutur Budi. Selain itu, KPK menduga penyerahan uang kepada Edison dilakukan melalui orang kepercayaan, Adi Triyadi (AD), yang juga merupakan kerabat dekat sang bupati. Dana tersebut disebut berasal dari penarikan tunai rekening nominee yang dilakukan oleh Radiansa (RDS). “Dalam periode 2025-2026, penyerahan uang kepada EDS dilakukan dengan cara penarikan tunai dari rekening para nominee melalui Sdr. RDS kepada Sdr. AD selaku orang kepercayaan sekaligus kerabat EDS. Adapun uang yang diterima digunakan untuk keperluan pribadi EDS,” beber Budi. Dalam OTT tersebut, KPK turut mengamankan berbagai barang bukti berupa uang tunai rupiah dan mata uang asing, saldo rekening, hingga barang bukti elektronik dengan total sekitar Rp 1,9 miliar. Rinciannya meliputi uang tunai Rp 323 juta dari tas ransel ABN, uang di brankas rumah sebesar Rp 40 juta, USD 3.200, SAR 2.260, serta saldo rekening sejumlah Rp 1,47 miliar. Atas perbuatannya, EDS, ABN, dan RSH, selaku pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan/atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara CRH, selaku pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 605 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan/atau Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (jp)

sekolah perlu terus diperkuat agar makanan yang dijual memenuhi standar keamanan pangan. Aspek kebersihan, penggunaan bahan yang aman, masa kedaluwarsa produk, serta kehalalan pangan menjadi hal yang harus mendapat perhatian bersama,” ujarnya. Lebih lanjut, Idah menegaskan bahwa keamanan pangan merupakan bagian penting dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, pengawasan dan edukasi perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara BPOM, Dinas Kesehatan, BKKBN, Badan Gizi Nasional, Pramuka, dan berbagai pihak terkait. Pada kesempatan tersebut turut dilaksanakan pembacaan deklarasi komitmen keamanan pangan serta penandatanganan komitmen bersama pengawasan keamanan pangan jajanan sekolah oleh seluruh stakeholder terkait. (tro/\*)





## MENKOMDIGI TEGASKAN LKBN ANTARA JADI GARDA TERDEPAN JAGA FAKTA DAN INTEGRITAS INFORMASI DI ERA DIGITAL

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan pidato dalam Rakernas Perum LKBN ANTARA 2026 di Yogyakarta, Jumat (5/6/2026). Rakernas ANTARA kali ini mengangkat tema Mengkokohkan Peran Strategis ANTARA dalam Ekosistem Informasi Negara dan Transformasi Bisnis Media Digital.

## Mensos : Tindak Tegas Pelaku Perundungan di Sekolah Rakyat

**BANDA ACEH, 08/6 (ANTARA)** - Menteri Sosial Saifullah Yusuf, menyatakan tidak akan mentoleransi serta akan menindak tegas setiap pelaku perundungan di lingkungan Sekolah Rakyat. “Ada tiga hal yang tidak boleh dilakukan di Sekolah Rakyat yakni perundungan, kekerasan seksual dan fisik serta intoleransi,”kata Mensos di sela-sela kegiatan open house sekolah rakyat untuk orang tua dan calon siswa sekolah rakyat yang dipusatkan di Sekolah Rakyat Menengah Atas I Aceh Besar, Sentra Darussaã€”adalah Provinsi Aceh, di Aceh Besar, Senin. Ia menjelaskan Sekolah Rakyat harus menjadi lingkungan yang aman, nyaman dan bebas dari perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi. “Jika ada yang terlibat dalam tiga hal yang tidak boleh dilakukan di Sekolah Rakyat, kami tidak akan segan-segan memberhentikannya,”kata Saifullah Yusuf.

Karena itu, ia mengajak seluruh

guru dan yang terlibat dalam pelaksanaan sekolah rakyat dapat benar-benar menjaga agar ketiga hal tersebut tidak terjadi di lingkungan Sekolah Rakyat. Saifullah Yusuf menambahkan gagasan dan program strategis dari Presiden Prabowo Subianto yang memberikan kesempatan bagi keluarga kurang mampu atau yang belum sejahtera untuk mendapatkan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka. Sekolah Rakyat merupakan bagian dari pemerintah hadir untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Dalam kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat Menengah Atas I Aceh Besar, Sentra Darussaã€”adalah Provinsi Aceh, Mensos turut didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah dan Bupati Aceh Besar Muharram Idris. (\*)

Pewarta : M Idfhal

## KEPALA BAKOM RI

# Dorong Penguatan Peran ANTARA di Era Digital

**YOGYAKARTA (ANTARA)**

- Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Muhammad Qodari mendorong penguatan peran Perum LKBN ANTARA agar tetap relevan di era digital melalui penguatan kualitas pemberitaan, transformasi platform, serta optimalisasi jaringan daerah. “Komunikasi pemerintah hari ini tidak cukup hanya dengan mengumumkan program. Yang harus dilakukan adalah menjelaskan konteks, manfaat, alasan, dan arah kebijakan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh rakyat,” kata Qodari saat memberikan arahan dalam Rapat Kerja Nasional ANTARA 2026, pada tanggal 3-5 Juni.

Menurut dia, ANTARA memiliki posisi strategis dalam menjembatani komunikasi pemerintah kepada masyarakat melalui pemberitaan yang akurat, terverifikasi, dan mudah dipahami publik.

Qodari juga mendorong ANTARA memperkuat praktik evidence-based reporting dengan menjadikan data, riset,

dan konteks kebijakan sebagai dasar pemberitaan.

“Riset, angka, dan konteks kebijakan adalah senjata efektif untuk membuat rakyat memahami program negara. Fakta yang disajikan dengan baik jauh lebih persuasif daripada klaim,” ujarnya. Selain itu, ia menilai transformasi digital perlu terus dipercepat mengingat masyarakat kini semakin banyak mengonsumsi informasi melalui video pendek, infografis, podcast, hingga berbagai format konten digital lainnya.

Karenaitu, ANTARA didorong untuk mengembangkan talenta yang mampu mengolah produk jurnalistik dalam format kekinian, termasuk memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial (AI) guna mendukung produksi konten yang lebih menarik dan relevan. Dalam arahnya, Qodari juga menekankan pentingnya menjaga keunggulan ANTARA melalui jaringan biro yang tersebar di berbagai daerah. Menurut dia, jaringan tersebut



**Kepala Bakom Muhammad Qodari menyampaikan arahan saat acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026 PERUM LKBN ANTARA, di Yogyakarta yang berlangsung Rabu-Jumat (3-5/6/2026).**

menjadi modal penting untuk mengomunikasikan berbagai program pembangunan secara lebih dekat kepada masyarakat.

Qodari berharap ANTARA dapat menjadi media yang mampu memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai berbagai program pemerintah di tengah dinamika ekosistem media digital saat ini. “ANTARA harus lebih produktif.

Mudah-mudahan dengan kelebihan ANTARA seperti jaringannya, pengalamannya, standar jurnalisemnya, justru menjadi penerang, memberikan penunjuk di dalam konteks sekarang ini, terkait khususnya program-program pemerintahan,” ujarnya. (\*)

Pewarta: Wening Caya Ing Tyas

## Gubernur Gorontalo

# Ajak Peternak Lokal Isi Kebutuhan Daging Nasional

**GORONTALO - 08/6 (ANTARA)**

- Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengajak peternak di daerah itu meningkatkan produksi sapi, kambing, dan domba untuk memanfaatkan peluang pasar nasional yang masih bergantung pada impor daging. Menurut Gusnar, kebutuhan daging dalam negeri yang belum sepenuhnya dipenuhi oleh produksi nasional membuka peluang bagi daerah penghasil ternak, termasuk Gorontalo, untuk memperluas usaha peternakan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kalau kita masih

impor, berarti pasar nasional masih terbuka. Ini yang saya tangkap dan saya ajak seluruh peternak di Gorontalo untuk mengembangkan usaha ternaknya,” ujar Gusnar, Senin.

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Gorontalo menjadikan sektor peternakan dan perkebunan sebagai salah satu prioritas pembangunan ekonomi daerah. Untuk mendukung peningkatan populasi ternak, pemerintah mengoptimalkan program inseminasi buatan yang dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan pengadaan

ternak secara langsung.

Selain memperluas cakupan inseminasi buatan, pemerintah daerah juga akan memperkuat peran para inseminator yang menjadi ujung tombak peningkatan produktivitas peternakan di lapangan.

Di sektor perkebunan, Gusnar mendorong pengembangan komoditas kelapa yang terintegrasi dengan program hilirisasi. Menurut dia, pengembangan kebun kelapa harus diikuti dengan penguatan industri pengolahan agar mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat. Ia berharap

Gorontalo dapat menjadi salah satu daerah yang berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional sekaligus mengembangkan industri berbasis komoditas unggulan daerah.

Sebelumnya, Gusnar meninjau layanan kesehatan hewan, pelaksanaan inseminasi buatan, serta menyerahkan bantuan berupa DOC (day old chick) dan bibit kelapa kepada kelompok penerima manfaat di Laboratorium Veteriner Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo. (\*)

Pewarta: Faradila Alim

## FOTO CERITA

# Membuka Kabut Digital di Papua Pegunungan



**BENTANG** Pegunungan Jayawijaya menjadi tantangan pemerataan konektivitas dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia Timur. Berbeda dengan wilayah pegunungan di Pulau Jawa yang telah ditunjang jaringan jalan dan infrastruktur memadai, tantangan aksesibilitas wilayah di Papua Pegunungan menyebabkan pembangunan jaringan telekomunikasi di sana membutuhkan biaya lebih besar dan waktu lebih panjang.

Material pembangunan seperti tower BTS, perangkat jaringan, hingga genset harus diangkut menggunakan pesawat perintis atau helikopter untuk menjangkau distrik-distrik terpencil. Bahkan, cuaca ekstrem, kabut tebal, dan longsor juga kerap menghambat proses pembangunan maupun pemeliharaan jaringan.

Sementara itu, berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2025, penetrasi internet nasional atau persentase penduduk yang memiliki akses internet di Indonesia mencapai 80,66 persen. Namun tingkat

penetrasi internet di Maluku dan Papua masih berada di angka sekitar 69,26 persen sehingga kesenjangan konektivitas antarwilayah masih terlihat.

Kesenjangan digital tersebut tak bisa terus dibiarkan terjadi di wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua Pegunungan, dari dunia luar. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berupaya m e m b u k a y a d e n g a n peningkatan sejumlah fasilitas penunjang di sana.

Pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Wamena menjadi salah satu upaya memperkuat layanan internet di Papua Pegunungan. Sejak 2019, kapasitas jaringan internet di Papua Pegunungan meningkat bertahap dari 7,6 gigabites per second (gbps) hingga pada 2026 mencapai 40 gbps. Peningkatan sejauh itu bisa dicapai setelah dilakukan pengembangan infrastruktur Community Gateway Wamena dengan konektivitas berbasis satelit Low Earth Orbit (LEO). Sistem tersebut juga meningkatkan proses pengiriman data dari

perangkat pengguna seperti gawai, komputer, dan router hingga 30 persen. Wilayah yang sebelumnya terisolasi kini mulai terhubung melalui jaringan telekomunikasi berbasis satelit maupun infrastruktur pendukung lainnya. Kehadiran fasilitas telekomunikasi di kawasan pegunungan menjadi penghubung penting bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun hidup jauh dari akses informasi dan layanan digital.

Warga mulai memanfaatkan gawai untuk berkomunikasi, mengakses informasi, hingga mendukung aktivitas ekonomi dan pendidikan. Wilayah di Lembah Baliem yang dikelilingi Pegunungan Jayawijaya seakan tidak lagi menjadi penghalang bagi warga setempat untuk terhubung ke seluruh penjuru dunia. “Dulu kami susah berkomunikasi dengan keluarga di luar Wamena karena sinyal sering hilang dan akses internet terbatas. Namun sekarang jaringan sudah lebih baik sehingga kami lebih mudah menelepon, mengirim pesan, bahkan bisa melakukan siaran

langsung untuk mengenalkan daerah kami,ã€ kata warga Wamena, Yewor (39).

Yewor tidak sendiri. Kini jumlah rumah tangga yang mengakses internet di Papua pegunungan semakin meningkat dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data BPS, pada 2024 jumlahnya 12,15 persen dan meningkat hingga akhir 2025 menjadi 26,61 persen rumah tangga yang ada di provinsi itu. Pertumbuhan angka tersebut pada akhirnya berpengaruh pada pertumbuhan perekonomiannya. BPS merilis ekonomi Papua Pegunungan pada Triwulan I 2026 secara year on year tumbuh 3,51 persen dibanding periode yang sama pada 2025. Pembangunan jaringan telekomunikasi di Indonesia Timur bukan sekadar menghadirkan sinyal komunikasi, melainkan juga membuka harapan baru tentang kesetaraan akses dan masa depan masyarakat Papua Pegunungan.

Foto dan teks: Bayu Pratama S

Editor: Puspa Perwitasari





SURAT KEPERCAYAAN DELAPAN DUBES

# Terlambat Penerimaan Prabowo Minta Maaf



Presiden RI Prabowo Subianto saat bertemu 8 delapan duta besar (dubes) negara sahabat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

## Tutup Pendaftaran SPPG, BGN Didemo Investor

JAKARTA - Pasca eks para pimpinan tersandung kasus dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) langsung melakukan sejumlah langkah efisiensi anggaran, salah satunya moratorium atau penghentian sementara pendaftaran dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.

Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengaku kebijakan baru tersebut memicu protes para investor, khususnya yang sudah membangun dapur di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

“Selanjutnya yang terakhir adalah

untuk 3T. Ini kami akan mencoba mengurangi tidak menggunakan APBN, mencoba ya. Tetapi tadi kami belum ke sini nih (acara pelantikan di Istana) sudah didemo nih (Kantor BGN) oleh apa namanya rupanya ada investor yang sudah membangun 3T,” kata Nanik usai pelantikannya di Istana, Senin (8/6). Nanik mengatakan, moratorium pendaftaran dapur baru dilakukan sembari menata ulang dapur-dapur yang telah ada saat ini. Di mana, BGN akan lebih recofusing terhadap jumlah penerima manfaat serta perbaikan kualitas menu MBG.

Sementara untuk fokus pemerataan

di daerah 3T, BGN akan memanfaatkan fasilitas kantin sekolah hingga bantuan sosial dari perusahaan. “Kami akan selesaikan bagaimana sebaiknya, tapi untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerjasamakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN atau mungkin ada hibah dari luar negeri atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi, masa sih bikinin dapur untuk masyarakat di situ enggak mau, kan enggak mahal juga. Jadi CSR mereka kan juga punya CSR,” pungkasnya. (jp)

## Nasib 1.023 Calon Dokter Terkatung-katung

JAKARTA - Komnas HAM akan memanggil Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiksisaintek) untuk mendalami persoalan 1.023 calon dokter dari perguruan tinggi negeri dan swasta yang hingga kini belum memperoleh sertifikat profesi dokter. Anggota Komnas HAM Amiruddin Al Rahab mengatakan langkah tersebut dilakukan setelah lembaganya menerima pengaduan dari Pergerakan Dokter Muda Indonesia terkait ketidakpastian status para calon dokter yang belum dapat memperoleh hak profesionalnya. “Ada seribuan lebih calon dokter yang sampai hari ini nasibnya terkatung-katung karena ada aturan baru dari Dikti. Komnas HAM dengan adanya aduan ini tentu akan menindaklanjutinya terutama dengan pihak terkait yaitu Kementerian Diktsaintek untuk menanyakan apa sesungguhnya yang menjadi problem dari seribuan orang ini sehingga terkatung-katung,” kata Amiruddin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (8/9). Menurut dia, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut kepastian hak para calon dokter, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan layanan kesehatan nasional yang masih membutuhkan tambahan tenaga medis. Amiruddin menilai kondisi tersebut menjadi ironi karena di satu sisi Indonesia masih menghadapi tantangan pemerataan dan ketersediaan dokter, sementara di sisi lain terdapat lebih dari seribu calon dokter yang belum dapat menjalankan profesinya akibat belum memperoleh sertifikasi. “Indonesia membutuhkan banyak dokter hari ini, sedangkan ini ada tersedia seribuan lebih dokter.

Kalau ditangani dengan baik, tentu kita akan mendapatkan tenaga dokter untuk bisa melayani masyarakat,” ujar dia. Komnas HAM memandang persoalan itu perlu segera mendapatkan kejelasan agar hak para calon dokter atas kepastian profesi dan kesempatan bekerja tidak terhambat. Oleh karena itu, lembaga tersebut akan melakukan pendalaman dengan melibatkan sejumlah pihak terkait. (jpnn/antara)

PENGUMUMAN LELANG KEDUA  
EKSEKUSI HAK TANGGUGAN

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Divisi Retail Collection & Recovery Region 11 melalui perantara Pejabat Lelang Kelas I pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo akan melakukan Eksekusi Hak Tanggungan tanpa kehadiran peserta lelang dengan penawaran melalui e - Auction Terhadap :

**GUSMAN SUAI**  
1 (satu) bidang tanah seluas 374 m2 dan bangunan tempat usaha/bengkel dan segala sesuatu yang melekat diatasnya terletak di Jalan Trans Sulawesi, Desa Hungayonaa, Kec Tilamuta, Kab Boalemo, Provinsi Gorontalo SHM No.796/Hungayonaa An. Gusman Suai.  
**(Nilai Limit Sebesar Rp.305.700.000 Uang Jaminan Sebesar Rp.61.140.000,-)**

1 (satu) bidang tanah seluas 479 m2 dan bangunan tempat usaha/bengkel sekaligus rumah tinggal dan segala sesuatu yang melekat diatasnya terletak di Jalan Trans Sulawesi, Desa Hungayonaa, Kec Tilamuta, Kab Boalemo, Provinsi Gorontalo SHM No.324/Hungayonaa An. Gusman Suai.  
**(Nilai Limit Sebesar Rp.550.400.000 Uang Jaminan Sebesar Rp.110.080.000,-)**

1 (satu) bidang tanah seluas 536 m2 dan bangunan tempat usaha/bengkel dan segala sesuatu yang melekat diatasnya terletak di Jalan H.M Soeharto, Desa Hungayonaa, Kec Tilamuta, Kab Boalemo, Provinsi Gorontalo SHM No.326/Hungayonaa An. Nirwati Naini.  
**(Nilai Limit Sebesar Rp.294.300.000 Uang Jaminan Sebesar Rp.58.860.000,-)**

**PELAKSANAAN LELANG :**

Cara Penawaran	Open Bidding dengan mengakses url <a href="https://www.lelang.go.id">https://www.lelang.go.id</a>
Tempat Lelang	KPKNL Gorontalo Jl. Achmad Nadjamuddin No. 07 Kota Gorontalo
Waktu Pelaksanaan lelang	Rabu, 24 Juni 2026 pukul 11.00 WITA/10.00 WIB atau sesuai waktu server
Batas Akhir Penawaran	Sejak tayang di <a href="https://www.lelang.go.id">lelang.go.id</a> atau portal. <a href="https://www.lelang.go.id">lelang.go.id</a> s.d. batas akhir penutupan penawaran
Penetapan Pemegang Lelang	Setelah Batas Akhir Penawaran
Pelunasan Harga Lelang	5 (Lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea lelang pembeli	2% dari harga lelang

**PERSYARATAN LELANG :**

- Peserta Lelang Harus memiliki akun yang telah diverifikasi pada Website <https://www.lelang.go.id>
- Syarat dan Ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat Website diatas.

**Keterangan:**

- Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan jaminan yang dipersyaratkan
- Calon Peserta Lelang / peminat agar mengantisipasi keterlambatan **Penerimaan** uang jaminan lelang pada rekening penampungan KPKNL Gorontalo akibat mekanisme transfer perbankan (End of Day) yang dapat mengakibatkan kegagalan menjadi peserta lelang. Untuk menghindari keterlambatan **Penerimaan** uang jaminan lelang. Calon peserta lelang / peminat dapat menyetorkan uang jaminan lelang lebih awal dan menghindari batas akhir waktu penyetoran.
- Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat - lambatnnya 1 (Satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang (pukul 23.59 WIB)
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban perserta lelang.

Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT Bank Negara Indonesia (Persero), Divisi Retail Collection & Recovery Region 11, Jl. A.A Maramis, Paniki Bawah, Mapanget, Manado atau KPKNL Gorontalo Jl. Achmad Nadjamuddin No 7 Kota Gorontalo Telp.0435-822046. Layanan WA 082298170351.

NB :Hati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan Pegawai KPKNL atau Karyawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Segala urusan keterkaitan dengan lelang ini agar mendatangi KPKNL Gorontalo / Pemohon (sesuai dengan alamat tersebut diatas)

Manado, 10 Juni 2026

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**  
Divisi Retail Collection & Recovery Region 11

Ttd

**Ignatius Eko Setiawan**  
Head Of RCR Region 11

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
KANTOR CABANG MENARA BRILIAN  
Gedung Menara Brilian Lt. 1-2 Jl. Gatot Subroto Kav. 64 No. 177A Jakarta Selatan  
Telepon : (021) 50961400  
email : [I0426@corp.bri.co.id](mailto:I0426@corp.bri.co.id) website : [www.bri.co.id](http://www.bri.co.id)

**PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUGAN**

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk. Kantor Cabang Menara Brilian selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama yang berirah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang Internet (E-Auction) dengan penawaran melalui internet (Internet Open bidding) terhadap agunan debitur berupa:

- Muhammad Ali**
  - Sebidang tanah seluas 127 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri/ tertanam diatasnya sesuai SHGB No. 473/ Libuo terdaftar atas nama Muhammad Ali, terletak di Perumahan Puri Manggis Residence Blok B No.12 Kel. Libuo Kec. Duingingi Kota Gorontalo Prov. Gorontalo.  
**(Nilai Limit Rp.195.000.000,- dan Uang Jaminan Rp.39.000.000,-).**
- Syarif Mahdi**
  - 4 (empat) bidang tanah luas total 698 m2 berikut segala sesuatu yang berdiri/ tertanam diatasnya dijual 1 paket terdiri dari:SHGB No. 509/ Libuo luas 165 m2, SHGB No. 461/Libuo luas 171 m2, SHGB No. 462/Libuo luas 177 m2 dan SHGB No. 463/ Libuo luas 185 m2 semuanya terdaftar atas nama Syarif Mahdi, terletak di Perumahan Puri Manggis Residence Blok A No.1,2,3 dan 4 Kel. Libuo Kec. Duingingi Kota Gorontalo Prov. Gorontalo.  
**(Nilai Limit Rp.628.500.000,- dan Uang Jaminan Rp.125.700.000,-).**
  - Sebidang tanah seluas 195 m2 dan segala sesuatu yang berdiri/ tertanam diatasnya sesuai SHGB No. 465/ Libuo terdaftar atas nama Syarif Mahdi, terletak di Perumahan Puri Manggis Residence Blok A No.6 Kel. Libuo Kec. Duingingi Kota Gorontalo Prov. Gorontalo.  
**(Nilai Limit Rp.146.250.000,- dan Uang Jaminan Rp.29.250.000,-).**

**Pelaksanaan Lelang dilakukan pada :**

Cara Penawaran : Open Bidding  
Hari/Tanggal : Rabu/ 24 Juni 2026  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran  
Batas Akhir Penawaran : 24 Juni 2026 Pukul 14.00 WITA/13.00 WIB Waktu Server Aplikasi Lelang Internet  
Alamat Domain : [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)  
Tempat Lelang : KPKNL Gorontalo, Jalan Achmad Nadjamudin No. 07 Kota Gorontalo Ruang Lelang  
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran  
Bea Lelang Pembeli : 2 % dari harga Lelang  
Pelunasan Harga Lelang : paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan Lelang  
PPn : 1,1 % dari harga lelang dibayarkan kepada penjual

**Keterangan :**

- Nominal Jaminan yang disetorkan ke rekening Virtual Account (VA) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan (tidak boleh dicicil) dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Gorontalo selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat diatas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
- Uang jaminan peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang akan dikembalikan ke rekening peserta yang sudah didaftarkan. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

**Persyaratan Lelang :**

- Memiliki Akun yang telah terverifikasi pada website [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id). Syarat dan Ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu Tata Cara dan Prosedur dan Panduan Penggunaan pada alamat website tersebut.
- Obyek Lelang dijual dengan ketentuan dan kondisi apa adanya(as is) sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Gorontalo dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KC Menara Brilian.
- Peserta Lelang diwajibkan melihat barang yang akan dilelang pada alamat obyek Lelang mulai Pengumuman ini terbit sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KC Menara Brilian, Telp. 021-50961400 dan KPKNL Gorontalo di Telp.0435-823727.

Jakarta, 10 Juni 2026

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,**  
Kantor Cabang Menara Brilian

Ttd

**Marco Arief Pramudita**  
Pemimpin Cabang



Selain kompetisi karya, peserta juga dapat mengikuti social media challenge dengan mengunggah konten kreatif terkait SDGs yang relevan dengan kehidupan sehari-hari pada akun Instagram. AHM menyiapkan total hadiah ratusan juta rupiah untuk para pemenang berupa beasiswa pendidikan, sertifikat pemenang dan hadiah menarik. Sebagai bentuk apresiasi lainnya juga disiapkan untuk peran guru dalam mendampingi pengembangan dari pemenang terbaik pada ajang AHM Best Student 2026. (tro)



# Potensi Pajak Kendaraan Belum Tergarap Maksimal

## Dekot Dorong Pendataan Ulang Kendaraan Berpelat Luar Daerah

**GORONTALO-GP-** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Dekot) Gorontalo menilai potensi pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor masih belum tergarap secara maksimal. Realisasi penerimaan yang ada saat ini dinilai belum sebanding dengan jumlah kendaraan yang beroperasi di wilayah Kota Gorontalo.

Anggota Dekot, Suryadi

Antule mengatakan bahwa adanya indikasi ketidaksinkronan antara data jumlah kendaraan dengan angka penerimaan pajak kendaraan bermotor yang tercatat selama ini. Sehingga masih terdapat potensi pajak kendaraan yang belum masuk ke kas daerah.

“Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan daerah,” ujar Suryadi. Selain itu, dirinya juga menyoroti banyaknya kendaraan berpelat nomor luar daerah yang diduga dimiliki dan digunakan oleh warga Kota Gorontalo. Kondisi tersebut dinilai ikut

memengaruhi rendahnya kontribusi pajak kendaraan terhadap pendapatan daerah karena pembayaran pajak dilakukan di daerah asal kendaraan terdaftar.

Menurut Suryadi, pemerintah daerah perlu mengambil langkah konkret untuk mengidentifikasi kendaraan berpelat luar daerah yang pemiliknya berdomisili di Kota Gorontalo. Dengan demikian, kendaraan tersebut dapat didorong untuk melakukan mutasi dan membayar pajak di daerah tempat tinggal pemiliknya.

“Kami mendorong Pemda untuk mengidentifikasi



Suryadi Antule

kendaraan berpelat luar, tapi pemiliknya warga Kota Gorontalo. Jika ditemukan, maka perlu ada pendekatan agar mereka mau mengganti

plat dan membayar pajak di Samsat Kota Gorontalo,” katanya. Dekot menilai upaya tersebut penting dilakukan karena sektor pajak kendaraan bermotor memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah. Semakin optimal penerimaan pajak, semakin besar pula ruang fiskal pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. “Ini bukan sekadar soal plat nomor, tapi soal potensi pajak yang bisa dipakai untuk pembangunan daerah,” tegas Suryadi.

Menanggapi rekomendasi Dekot tersebut, Wakil Wali

Kota Gorontalo, Indra Gobel, menyatakan pemerintah daerah siap menindaklanjuti masukan tersebut. Salah satu langkah yang akan dilakukan yakni pendataan ulang kendaraan berdasarkan domisili pemilik.

Menurutnya, pendataan yang lebih akurat diperlukan untuk mengetahui potensi riil pajak kendaraan yang selama ini belum tercatat sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan dapat terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. (Adv)



Rapat Paripurna yang digelar di Aula I Dekot. (F. Istimewa)

## Irwan Perkuat Kolaborasi Cegah Peredaran Narkoba

**GORONTALO-GP-** Upaya menekan peredaran narkoba di Kota Gorontalo terus diperkuat melalui kolaborasi lintas lembaga. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Dekot) Gorontalo menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN), dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba.

Menurut Ketua Dekot Gorontalo, Irwan Hunawa,, persoalan narkoba merupakan isu besar yang tidak bisa ditangani oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan kerja sama dan kolaborasi semua pihak agar upaya pencegahan dapat berjalan efektif.

“Penanganan narkoba ini tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu lembaga. Harus ada kolaborasi dan sinergi untuk



Irwan Hunawa

menciptakan Kota Gorontalo yang bebas narkoba,” ujarnya.

Lanjut Irwan menjelaskan, salah satu langkah yang terus didorong adalah mempersempit ruang gerak peredaran narkoba melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah kota, kata dia, selama ini telah memfasilitasi edukasi tersebut

dalam berbagai pertemuan bersama warga.

“Setiap ada pertemuan antara pemerintah dan masyarakat, selalu disisipkan sosialisasi terkait bahaya narkoba. Ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat,” jelasnya. Meski demikian, Irwan mengakui bahwa upaya pemberantasan narkoba bukan perkara mudah. Pasalnya, setiap langkah penekanan yang dilakukan pemerintah seringkali diikuti dengan berbagai cara baru dari pelaku untuk memperluas jaringan peredaran.

“Ini yang membuat kita harus terus bergerak bersama. Karena ketika ada upaya pengurangan, mereka juga mencari cara untuk menyebarluaskan,” tambahnya.

Sebagai bentuk penguatan kolaborasi, Dekot Gorontalo

berencana melibatkan BNN secara langsung dalam kegiatan reses. Dalam kegiatan tersebut, BNN akan diberikan ruang untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya narkoba.

“Kami akan mengundang BNN dalam setiap kegiatan reses, agar mereka bisa langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat. Karena mereka memiliki kewenangan dan penanganan khusus di bidang ini,” tegas Irwan.

Ia berharap, dengan sinergi yang terus dibangun, upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Kota Gorontalo dapat berjalan lebih optimal.

“Ini menjadi tanggung jawab bersama. Kita semua punya peran dalam mewujudkan Kota Gorontalo yang bebas dari narkoba,” pungkasnya. (Adv)

## Yolan Dorong Sinergi Cegah Kekerasan Anak di Gorontalo

**GORONTALO -GP-** Tingginya kasus kekerasan terhadap anak di berbagai daerah, termasuk Gorontalo, menjadi perhatian serius Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Dekot) Gorontalo, Yolan Polontalo.

Anggota Komisi II itu menekankan bahwa upaya perlindungan anak tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan memerlukan sinergi seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, komunitas, hingga pemerintah daerah.

“Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Semua pihak harus bekerja sama, koordinasi lintas sektor mutlak diperlukan agar pencegahan kekerasan benar-benar efektif,” ujar Yolan.

Menurut Yolan, masih banyak wilayah di Kota Gorontalo yang minim layanan dasar dan sistem perlindungan anak. Kondisi ini menuntut pemerintah dan masyarakat untuk lebih proaktif dalam menyediakan akses pendidikan, kesehatan, dan mekanisme pengaduan yang mudah dijangkau anak-anak dan keluarga mereka.

Selain itu, Sriandi Dekot itu juga menekankan pentingnya satuan pendidikan yang aman dan inklusif, sehingga anak-anak dapat belajar tanpa rasa takut dan tekanan sosial. Sekolah, kata dia, harus menjadi ruang yang tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga mendidik karakter, empati, dan keberanian anak.

“Setiap kebijakan yang



Yolan Polontalo

dirancang untuk anak harus berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Tidak boleh hanya teori atau formalitas semata,” tambah legislator dari Partai PDIP ini.

Yolan berharap, melalui sinergi lintas sektor, Gorontalo bisa menjadi kota ramah anak, di mana setiap anak mendapat perlindungan, kesempatan belajar yang layak, serta lingkungan yang aman untuk tumbuh dan berkembang. Legislator ini juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif melaporkan kasus kekerasan, serta mendukung program-program yang membangun kesadaran tentang hak-hak anak.

Dengan pendekatan kolaboratif ini, Yolan yakin upaya mencegah kekerasan terhadap anak akan lebih efektif, dan generasi muda Gorontalo bisa tumbuh menjadi individu yang kuat, kreatif, dan berdaya saing, tanpa terhambat oleh trauma atau ketidakadilan sejak dini. (Adv)

Berlangganan Koran muali dari

IDR 75.000

SCAN ME

Harian Gorontalo Post Cetak & Digital

Koran Digital

**GORONTALO POST**

**ANDA INGIN**

Berlangganan Koran Gorontalo Post

atau

**KORAN ANDA BELUM DIANTAR AHRI INI**

Hubungi :

**0812-4470-554**

**J&T CARGO**

GORONTALO 907A

100% Dijamin Ekonomis

0853 9448 8783 0822 9309 9280 0821 9588 2277

**J&T Cargo Gorontalo Post**

**KIRIM CEPAT, MURAH & BISA BANYAK**

Alamat : Jl. Dr. Jhon Aryo Katili No.144 Kel. Paguyaman Kec.Kota Tengah, Kota Gorontalo

RENUNGAN ROHANI  
BE RADIO - 94.3 FM  
SETIAP HARI  
08.00 WITA

**CITY HARVEST CHURCH INDONESIA - GORONTALO**

JL. WOLTER MONGINSIDI  
CONTACT PERSON 0435-829392  
WHATSAPP : 085256276914  
INSTAGRAM/FACEBOOK : C HARVEST GORONTALO  
YOUTUBE : CHC INDO GTO

**IBADAH RALLY PRAYER**  
SETIAP HARI KAMIS PUKUL 19.30 WITA

**IBADAH DOA FAJAR VIA ZOOM MEETING**  
MEETING ID: 366 681 7318 - PASSCODE: BLESSED  
SETIAP HARI JUMAT PUKUL 05.00 WITA

**BEFORE BED (DOA SEBELUM BERISTIRAHAT)**  
VIA ZOOM MEETING ID: 366 681 7318 - PASSCODE: BLESSED  
SETIAP HARI SENIN DAN JUMAT PUKUL 21.00 WITA

**GEREJA ANAK (CHILDREN'S CHURCH)**  
SETIAP HARI MINGGU PUKUL 09.30 WITA

**IBADAH RAYA PAGI (LIVE STREAMING VIA YOUTUBE)**  
SETIAP HARI MINGGU PUKUL 09.00 WITA

**IBADAH RAYA SORE (DI HOTEL ELIZABETH LIMBOTO, SAMPING POLRES)**  
SETIAP HARI MINGGU PUKUL 17.00 WITA

**IBADAH STAY : STUDENT-TEENAGE-AND-YOUTH**  
SETIAP HARI MINGGU PUKUL 17.00 WITA



## KUNJUNGAN LAPANGAN KOMISI III

# Pengerukan Sedimentasi Diawasi



KUNJUNGAN lapangan Komisi III Deprov Gorontalo meninjau pengerukan sedimentasi saluran pengairan di Kecamatan Telaga Jaya.

## KDMP TANGKOBU BOALEMO

## Komisi I Cek Kesiapan Lahan

**PUNCAK BOTU -GP-** Komisi I Deprov Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Desa Tangkobu, Kabupaten Boalemo, dalam rangka peninjauan kesiapan lahan untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi I menemukan bahwa Desa tangkobu telah

menunjukkan kesiapan konkret melalui ketersediaan lahan desa serta telah adanya bangunan koperasi desa yang dapat menjadi modal awal penguatan ekonomi masyarakat.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Ramdan Liputo menilai bahwa kesiapan Desa Tangkobu patut diapresiasi karena

pembangunan Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya membutuhkan dukungan program dari pemerintah, tetapi juga memerlukan keseriusan desa dalam menyiapkan aspek kelembagaan, aset, legalitas, dan dukungan masyarakat. "Yang kami lihat di Desa Tangkobu ini cukup positif. Desa sudah memiliki lahan, bahkan sudah ada bangunan koperasi desa. Ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya menunggu program, tetapi sudah memiliki inisiatif untuk menyiapkan fondasi ekonomi desa," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa penyediaan lahan untuk koperasi desa harus tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, bangunan desa, dan aset lainnya milik desa. Aset tersebut harus dikelola untuk sebesar-besarnya kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. **(rmb)**



Kunjungan lapangan Komisi I mengecek kesiapan lahan pembangunan koperasi desa merah putih (KDMP).

**PUNCAK BOTU -GP-** Komisi III Deprov Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka monitoring pelaksanaan pengerukan sedimentasi saluran pengairan di Kecamatan Telaga Jaya, Senin (8/6/2026).

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan program normalisasi saluran yang diusulkan masyarakat melalui reses dapat berjalan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat bagi sektor pertanian.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi III Espin Tulie, bersama Anggota Komisi III, Hais Ayuwa, serta pihak terkait lainnya.

Anggota Komisi III, Hais Ayuwa, menjelaskan bahwa pekerjaan pengerukan sedimentasi yang saat ini sedang berlangsung merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang disampaikan pada kegiatan reses tahun 2025.

Menurutnya, keluhan masyarakat terkait kondisi saluran yang mengalami pendangkalan telah menjadi perhatian DPRD dan kini berhasil direalisasikan melalui program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD.

"Anggaran ini digunakan untuk menormalisasi saluran yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan saat reses tahun 2025 dan alhamdulillah pada tahun ini sudah dapat direalisasikan melalui Pokir," ujar Hais Ayuwa saat meninjau lokasi kegiatan.

Ia menambahkan, program pengerukan sedimentasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kelancaran sistem irigasi yang menjadi sumber pengairan bagi lahan pertanian masyarakat, khususnya sawah yang berada di wilayah Telaga Jaya dan sekitarnya.

Kegiatan pengerukan dilaksanakan di beberapa desa, yakni Desa Lupoyo, Mongolato, dan Bulota. Pelaksanaannya dibagi berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat petani.

Untuk mendukung program tersebut, telah dialokasikan anggaran sekitar Rp400 juta yang dibagi kepada dua kelompok pelaksana. Hais Ayuwa menjelaskan bahwa pekerjaan dilakukan dengan sistem swakelola oleh kelompok tani setempat sehingga masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan.

"Anggarannya kurang lebih Rp400 juta dan dibagi kepada dua kelompok. Pelaksanaannya dilakukan secara swakelola oleh kelompok tani sehingga masyarakat juga ikut berperan dalam pengerjaan program ini," jelasnya.

Melalui monitoring ini, Komisi III berharap pekerjaan pengerukan sedimentasi dapat selesai sesuai target dan mampu meningkatkan produktivitas pertanian melalui sistem pengairan yang lebih optimal. Selain itu, kegiatan ini menjadi bukti bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses dapat ditindaklanjuti dan direalisasikan melalui program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. **(rmb)**

## PENDIDIKAN

# Dosen FIP UNG Tembus Jurnal Internasional Bereputasi

## Publikasi Kaji Transformasi Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini di Slovakia

**GORONTALO-GP-** Universitas Negeri Gorontalo (UNG) kembali menorehkan prestasi akademik di tingkat internasional. Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) UNG, Dr. Pupung Puspa Ardini, M.Pd., berhasil mempublikasikan artikel ilmiah pada International Journal of Child Care and Education Policy, salah satu jurnal internasional bereputasi, edisi tahun 2026. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa akademisi UNG mampu bersaing dalam berkontribusi dalam pengembangan ilmu

pengetahuan di tingkat global. Publikasi ini sekaligus memperkuat posisi UNG sebagai perguruan tinggi yang terus mendorong budaya riset dan kolaborasi internasional.

Artikel yang dipublikasikan berjudul The Policy of the Profession in Early Care and Preschool Education: Historical Dynamics on the Example of Slovakia. Penelitian tersebut merupakan hasil kolaborasi Dr. Pupung bersama dua akademisi dari Trnava University in Trnava, Slovakia, yakni Branislav Pupala dan Dana Masaryková.

Melalui penelitian itu, tim penulis mengkaji perjalanan kebijakan pendidikan anak usia dini di Slovakia dari masa ke masa. Kajian menelusuri dinamika kebijakan sejak era Austro-Hungaria, berlanjut pada periode sosialisme, hingga memasuki era demokrasi modern yang membawa berbagai perubahan dalam sistem pendidikan anak usia dini.

Penelitian tersebut mengungkap transformasi besar yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Slovakia. Sistem yang awalnya lebih berorientasi pada layanan kesehatan dan pengasuhan berkembang menjadi model yang semakin menitikberatkan aspek pendidikan secara komprehensif.

Selain itu, studi tersebut juga menyoroti perubahan peran para profesional di sektor pendidikan anak usia dini, termasuk guru taman kanak-kanak dan tenaga pengasuh. Berbagai tantangan kebijakan turut dibahas, terutama dalam upaya menyeimbangkan fungsi pendidikan dan pengasuhan yang menjadi fondasi penting bagi tumbuh kembang anak.

Rektor UNG, Eduart Wolok, menyambut positif capaian tersebut. Menurutnya, publikasi internasional yang dihasilkan akademisi UNG menunjukkan bahwa

kualitas riset dosen kampus kerakyatan itu semakin mendapat pengakuan di tingkat global. "Keterlibatan peneliti UNG dalam publikasi internasional ini menjadi bukti nyata bahwa akademisi UNG mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan pendidikan anak usia dini di tingkat global. Ini merupakan capaian yang patut diapresiasi dan dibanggakan bersama," ujar Eduart.

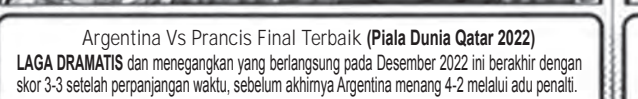
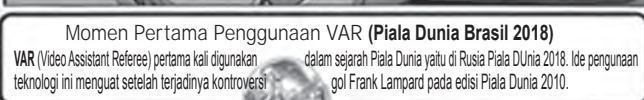
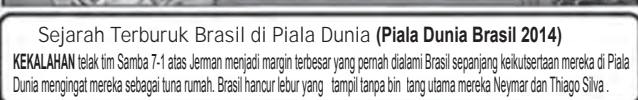
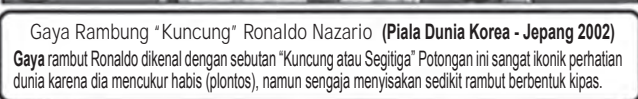
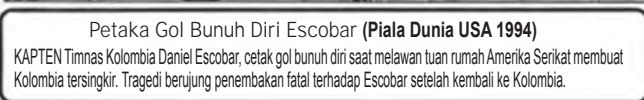
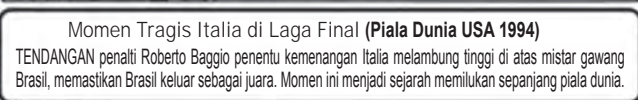
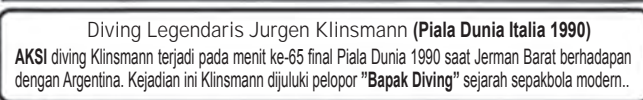
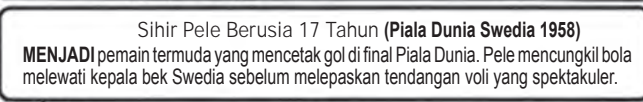
Ia menambahkan, keberhasilan tersebut sejalan dengan komitmen UNG dalam memperkuat budaya riset dan memperluas jejaring kerja sama internasional. Menurutnya, kolaborasi dengan peneliti dari luar negeri menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah.

"Capaian ini sekaligus memperkuat komitmen UNG dalam mendorong budaya riset, publikasi ilmiah bereputasi, serta

kolaborasi akademik internasional. Kami berharap semakin banyak dosen yang mampu menghasilkan karya-karya ilmiah berkualitas dan dipublikasikan pada jurnal bereputasi internasional," tambahnya.

Eduart juga berharap prestasi yang diraih Dr. Pupung dapat menjadi motivasi bagi dosen dan mahasiswa untuk terus aktif melakukan penelitian. Dengan demikian, hasil riset yang dihasilkan tidak hanya memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan masyarakat. "Prestasi ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi seluruh sivitas akademika UNG untuk terus berkarya, meneliti, dan menghasilkan publikasi yang memberikan dampak nyata, baik bagi dunia akademik nasional maupun komunitas ilmiah internasional," pungkasnya. **(Tr-76)**







## Kasus Curanmor di Tilongkabila Berhasil Diungkap

**BONE BOLANGO-GP** – Kasus pencurian sepeda motor (Curanmor), yang terjadi di Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, akhirnya berhasil diungkap oleh jajaran personel Satuan Reskrim Polres Bone Bolango.

Informasi yang dirangkum Gorontalo Post, usai menerima laporan, pihak Kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hasilnya, seorang lelaki bernama HZ (38), langsung diamankan setelah terbukti membawa kabur sepeda motor milik tetangganya sendiri, yang selama ini telah mengetahui kebiasaan korban saat memarkir kendaraan, di mana kunci sepeda motor disimpan dalam laci atau dasbor kendaraan.

Kapolres Bone Bolango, AKBP Supriantoro, S.H., S.I.K. saat memberikan keterangan dalam konferensi pers di Mapolres Bone Bolango, Senin (8/6) menjelaskan, peristiwa tersebut berawal dari kelalaian korban yang meninggalkan kunci kendaraan di tempat yang mudah dijangkau oleh orang lain. Faktor kelengahan pemilik kendaraan, menjadi salah satu penyebab utama yang dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksinya.

“Pelaku dapat dengan mudah membawa kendaraan karena kunci motor disimpan di dalam dasbor. Situasi ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan pencurian,” ujar AKBP Supriantoro.

Peristiwa yang terjadi pada Senin 18 Mei 2026 ini, dialami oleh korban berinisial RG (39). Pada saat itu, korban memarkirkan sepeda motor Yamaha Aerox miliknya di area gilingan padi, yang berada tidak jauh dari lahan persawahan tempatnya bekerja di Desa Bongoime. Usai memarkir kendaraan, korban kemudian menuju sawah untuk beraktivitas seperti biasa. Namun tanpa disadari, kunci sepeda motor tetap tersimpan di dalam laci kendaraan. Beberapa jam kemudian, saat hendak pulang, korban kembali ke lokasi parkir dan mendapati sepeda motor miliknya sudah tidak berada di tempat semula. Hal ini pun kemudian dilaporkan ke Polres Bone Bolango.

Kasat Reskrim Polres Bone Bolango, AKP Robin Talib menambahkan, pelaku memanfaatkan kondisi tersebut setelah mengetahui kunci kendaraan masih berada di dalam dasbor. Dengan leluasa, pelaku membuka laci motor, mengambil kunci, lalu membawa kendaraan tersebut keluar dari lokasi.

“Pelaku mengetahui kebiasaan korban yang sering meninggalkan kunci di dalam laci motor. Karena keduanya bertetangga dan cukup dekat, pelaku sudah memahami pola aktivitas korban sehingga memanfaatkan kesempatan tersebut,” kata AKP Robin.

Setelah menerima laporan, tim penyidik Polres Bone Bolango segera melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap pelaku. Dari hasil pengumpulan keterangan saksi dan pendalaman informasi di lapangan, identitas pelaku akhirnya berhasil diketahui. Polisi kemudian mengamankan HZ beserta barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Aerox yang sebelumnya dilaporkan hilang. Kendaraan tersebut berhasil ditemukan dan diamankan sebagai barang bukti dalam proses penyidikan.

“Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana pencurian. Ancaman hukuman yang dapat dikenakan berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda kategori V,” paparnya.

Polres Bone Bolango juga mengingatkan masyarakat agar lebih meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga kendaraan pribadi. Masyarakat diminta untuk tidak meninggalkan kunci di dalam kendaraan maupun di lokasi yang mudah dijangkau orang lain, karena dapat memicu terjadinya tindak kejahatan.

“Kami berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat, agar selalu menerapkan langkah-langkah keamanan dasar saat memarkir kendaraan, sehingga dapat meminimalisir risiko terjadinya pencurian kendaraan bermotor di lingkungan sekitar,” harapnya. **(tha)**



Barang bukti satu unit motor yang di curi tetangganya, berhasil diamankan jajaran Polres Bone Bolango. (F. NATHARAHMAN/ GORONTALO POST)

# Kejari Tahan Sepuluh Tersangka PETI Boalemo

Termasuk Oknum Kades, Terancam Lima Tahun Penjara

**GORONTALO-GP** -Perkara dugaan Pertambangan emas Tanpa Izin (PETI) yang melibatkan oknum Kepala Desa inisial SP di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman akhirnya diserahkan ke Kejaksaan. Menyusul penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari penyidik Polda Gorontalo ke Kejaksaan Negeri Boalemo, Rabu (8/6/2026).

Informasi yang dirangkum Gorontalo Post, tersangka PETI yang diserahkan ke Kejari sekitar pukul 10.00 Wlta itu berjumlah sepuluh orang. Adapun para tersangka masing-masing berinisial MAH, RK, IH, RH, RH, FM, SP, RAM, HH, dan RM. Satu

dari sepuluh tersangka itu adalah oknum Kepala Desa di Paguyaman, Boalemo yang diduga menjadi dalang dalam tambang ilegal tersebut. Selain itu sejumlah barang bukti berupa pipa, selang, mesin alkon (penyedot air), terpal dan lain sebagainya yang digunakan menambang diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Samba Sadikin, Wahyuni Pakaya, dan Hana Nabilah. Usai melakukan penelitian tersangka dan barang bukti, JPU langsung menahan kesepuluh tersangka. Mereka (tersangka,red) dibawa ke Lapas Kelas IIB Boalemo menggunakan mobil tahanan Kejari Boalemo.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Arief Mulya Sugiharto kepada Gorontalo Post mengatakan, sebelum diserahkan ke Kejari

Boalemo, tersangka dan barang bukti diserahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo. Namun, karena lokus atau lokasi kejadian di Boalemo, maka perkara tersebut diserahkan ke Kejari Boalemo oleh penyidik selanjutnya yang bertindak sebagai penuntut umum. “Para tersangka telah ditahan oleh JPU Kejari Boalemo,” kata Arief. Lebih lanjut Arief menerangkan, bahwa terhadap para tersangka dilakukan penahanan untuk kepentingan Penuntutan. Berdasarkan pasal 99 ayat 5 UU no 20 tahun 2025 tentang Kitab undang-undang hukum acara pidana. “Ya, intinya alasan penahanan dikhawatirkan para tersangka berupaya melarikan diri, berupaya merusak dan menghilangkan barang

bukti dan melakukan ulang tindak pidana,” jelas Arief. Adapun para tersangka disangka melanggar Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ancaman hukuman dalam pasal itu yakni pidana penjara lima tahun. Seperti diketahui, bahwa perbuatan kesepuluh tersangka terungkap setelah adanya aktivitas PETI di lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Pabrik Gula (PG) Gorontalo. Pihak perusahaan akhirnya melaporkan hal ini ke pihak kepolisian Polda Gorontalo dan Polres Boalemo. Setelah dilakukan operasi tangkap tangan, Simon Cs oknum Kades tersebut akhirnya berhasil diamankan Polda Gorontalo guna proses hukum lebih lanjut. **(roy)**



Penyerahan sepuluh tersangka Simon Cs serta barang bukti perkara PETI di Paguyaman Boalemo oleh penyidik Subdit Tipiter Polda Gorontalo ke Kejaksaan Negeri Boalemo.

## Ratusan Botol Miras Diamankan Polres Bone Bolango

**BONE BOLANGO-GP** – Ratusan botol minuman keras (Miras) berbagai merek berhasil diamankan oleh jajaran personel Polres Bone Bolango saat pelaksanaan Operasi Pekat Otanaha 2026.

Data yang dirangkum Gorontalo Post, ada kurang lebih 477 botol Miras yang berhasil disita di seluruh wilayah Bone Bolango, mulai dari warung kecil hingga rumah masyarakat. Ini menunjukkan masih tinggi aktivitas masyarakat yang mengkonsumsi dan mengedarkan Miras di wilayah Bone Bolango, sehingga menjadi perhatian serius aparat Kepolisian.

Kapolres Bone Bolango, AKBP Supriantoro, S.H., S.I.K. saat memberikan keterangan persnya kepada awak media Senin (8/6) mengatakan, tingginya jumlah barang bukti yang berhasil diamankan menjadi indikator bahwa peredaran dan konsumsi Miras di daerah masih cukup masif. Karena itu, pihaknya terus mengintensifkan langkah-langkah penegakan hukum melalui Operasi Pekat Otanaha, sebagai upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Dari hasil pengungkapan yang dilakukan, jumlah barang bukti yang berhasil diamankan cukup banyak. Ini menunjukkan bahwa peredaran Miras di wilayah Bone Bolango masih tinggi, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah penindakan untuk meminimalisir potensi tindak kriminal,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasat Samapta Polres Bone Bolango, Iptu Syamsul Azhar menyampaikan, rincian barang bukti yang berhasil diamankan selama operasi berlangsung yakni, 368 botol Bir Bintang, 47 botol Cap Tikus kemasan 600 mililiter, dua botol Bir Casanova, serta 60 botol

minuman jenis Kasegaran. Menurut Iptu Syamsul, pengungkapan kasus tersebut berawal dari tujuh laporan polisi yang diterima selama pelaksanaan operasi. Dari jumlah itu, lima laporan ditangani langsung oleh Polres Bone Bolango, sedangkan dua laporan lainnya berasal dari Polsek jajaran.

“Kami mencatat terdapat tujuh laporan polisi yang menjadi dasar pengungkapan kasus peredaran miras ini. Lima laporan ditangani Polres Bone Bolango dan dua laporan berasal dari Polsek jajaran,” jelasnya.

Ditambahkan pula, tingginya jumlah barang bukti yang berhasil diamankan menjadi gambaran bahwa tingkat konsumsi maupun distribusi Miras di tengah masyarakat masih perlu mendapat perhatian bersama. Oleh karena itu, kepolisian mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menekan peredaran miras di lingkungan masing-masing. Selain melakukan penindakan, Polres Bone Bolango juga terus mengedepankan langkah preventif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif konsumsi alkohol. Pasalnya, berdasarkan sejumlah kasus yang ditangani Kepolisian, Miras kerap menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya tindak pidana maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak lagi mengonsumsi Miras. Kepada para penjual juga kami meminta untuk menghentikan peredarannya, karena dari berbagai kasus tindak pidana yang terjadi, salah satu pemicunya adalah pengaruh alkohol,” tegas Syamsul. **(tha)**

## Diduga Bawa Narkoba Pemuda Asal Dengilo Ditangkap

**POHUWATO - GP** – Seorang pemuda asal Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato bernama AA (38), ditangkap oleh aparat Kepolisian.

Informasi yang dirangkum Gorontalo Post, penangkapan tersebut dilakukan pada Minggu (7/6) sekitar pukul 16.00 Wita, setelah anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato mendapatkan laporan dari masyarakat, terkait adanya peredaran narkoba di wilayah Pohuwato. Berbekal laporan tersebut, anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba, Iptu Budi Abdul Gani, S.H. kemudian melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan itulah, seorang lelaki bernama AA ditangkap di salah satu desa yang ada di Kecamatan Randangan.



Salah seorang pemuda asal Kecamatan Dengilo ditangkap oleh aparat Kepolisian atas kepemilikan narkotika jenis sabu.

Kapolres Pohuwato, AKBP H. Busroni, S.I.K., M.H. melalui Kasat Narkoba, Iptu Budi Abdul Gani, S.H. menjelaskan, pengungkapan ini dilakukan oleh pihaknya bersama dengan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo. Dari hasil itu, seorang lelaki bernama AA (38), telah diamankan beserta barang bukti.

Diantaranya, satu sachet plastik klip ukuran kecil dan satu potongan sedotan bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu, serta satu buah telfon genggam.

“Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polres Pohuwato dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Kami akan terus melakukan penindakan terhadap setiap pelaku yang terlibat,” kata mantan Kapolsek Mananggu ini. Ditambahkan pula, berdasarkan

hasil interogasi awal, terduga pelaku mengakui barang tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Tidak hanya itu saja, dari hasil test urine yang dilakukan terhadap pelaku, yang bersangkutan positif menggunakan Amphetamine dan Methamphetamine.

“Kami mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi kepada Kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika.

Terkait dengan persoalan ini, kami masih akan melakukan pemeriksaan dan pengembangan hingga ke wilayah Sulteng. Perkembangan lebih lanjut akan kami informasikan kembali,” pungkasnya. **(kif)**



# Program MBG Bukan Implikasi Nilai-nilai Pancasila?

**Selamat Memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026**  
**ALAM GIZI!***Program Strategi Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) apakah sebagai implikasi dari nilai-nilai Pancasila? Bagaimana bila pemerintahan RI Pimpinan Yth Jenderal (Purn) Prabowo Subianto berakhir, bagaimana nasib program ini, tenaga SPPG jadi apa, sarana prasarananya untuk apa?Sehingganya apakah Indonesia sedang dipandaikan dengan kekayaan harta benda dan intelektualnya ataukah sebaliknya?*

**Ketuhanan Yang Maha Esa**  
Sesungguhnya Pemerintah RI dalam Kepemimpinan Presiden RI Jenderal (Pur) Prabowo Subianto adalah kepemimpinan yang mengagungkan ciptaan Allah SWT Tuhan Yang Maha segalanya yakni melalui program MBGnya. Begitu khawatirnya Presiden akan masa depan generasi bangsa Indonesia, yang dipersiapkan menyongsong Indonesia Emas di Tahun 2045 bahkan untuk keberlangsungan eksistensi kekuatan bangsa selanjutnya.Denganmemperhatikan makanan anak bangsa, maka komitmen untuk melangsungkan generasi hari ini lebih baik dari kemarindan Generasi besok menjadi lebih baik dari hari ini adalah sesuai teori Religi dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 9 yang Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.  
Dengan proses pelaksanaan MBG, apakah mengejewantahkan Sila Pertama Pancasila? Buktinya latar belakang pemahaman tentang makanan tidak diperoleh sasaran MBG, sementara penanaman nilai-nilaiKetuhanan tentang makanan sangat penting dijabarkan. Contoh bagaimana sasaran memahami makanan itu sebagai zat pembentuk sel mani dan sel telur umat manusia agar dipersiapkan untuk melahirkan generasi yang lebih baik.Pada akhirnya nilai-nilai Ketuhanan yang didasari keilmiahn tentang mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (alami, beragam, bergizi, berimbang, aman dan menyehatkan) tidak dipahami bahkan tidak menjadi sikap dirinya dan bahkan tidak dipraktikkannya untuk dikonsumsi.

**Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab**  
Pemerintahan RI saat ini sangat hebat, karena memahami data dasar bangsa Inodnesia tentang masalah gizi dan kesehatan sehingga lahirlah program MBG. Tidak lain sebagai bukti bahwa negara hadir di tengah-tengah rakyat Indonesia yang bermasalah gizi dan kesehatan. Namun pemberian makanan ini apakah sebuah keadilan dan merupakan proses keberadabanbagi

rakyat Indonesia?  
Bagaimana dengan pemberian MBG merupakan sebuah keadilan bagi kehidupan manusia dan mempraktikkan adab kehidupan Indonesia, apakah ini terlaksana pada program dengan dana sangat besar ini? Apa keadilan yang terjadi?  
Sesungguhnya orang yang memperoleh MBG harus sesuai dengan kebutuhannya, melalui proses keadilan dan keberadaban yang diajarkan melalui makanan yang diberikan. Sangat disayangkan, ini tidak terjadi malah MBG dibarengi dengan pemberian produk yang bukan memberikan dampak ekonomi pada masyarakat setempat. Bahan makanan berasal dari luar daerah atau dibeli dari distributor. Sementara bahasa kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diterjemahkan bahwa MBG yang telah menggunakan dana yang sangat besar harus memfasilitasi produk makanan dari daerah yang bersangkutan untuk digunakan sehabis-habisnya sehingga uang bertahan di daerah tersebut. Ini menggerakkan para petani, pedagang UMKM atau pedagang besar yang ada di daerah itu, dan merupakan proses peningkatan ekonomi masyarakat.

**Persatuan Indonesia**  
Indonesia dengan 1128 suku (Heriawan 2010: bahwa hasil sensus BPS ada 1128 suku) bahkan lebih telah dipersatukan oleh bahasa Indonesia dan budayanya yang kaya dengan makanan tradisional. Apabila satu suku saja mempunyai makanan tradisional 10 jenis masakan, maka ada lebih dari sepuluh ribu jenis masakan yang ada di Indonesia dapat dilestarikan sebagai upaya terbaik untuk tetap menyatukan bangsa Indonesia. Tentunya, apa yang diharapkan oleh Presiden Prabowo untuk menggunakan bahan pangan lokal dapat terjadi karena semua makanan tradisional di Indonesia pakai bahan makanan lokal tersebut.  
Bila proses ini dilakukan melalui pembelajaran, maka setiap sekolah baik dari PAUD, SD, SLTP, SLTA dan sederajat bahkan perguruan tinggi melestarikan budaya bangsa Indonesia melalui makanan tradisional.Pelestarian budaya ini sebagai pemersatu bangsa dalam ikatan melestarikan budaya daerahnya.

Selanjutnya, makanan tradisional dijadikan makanan nasional dan selalu dihidangkan dalam kegiatan yang berskala nasional, regional maupun internasional. Tentunya secara persatuan akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi generasi Indonesia yang selalu didasari oleh kecintaannya pada bangsanya melalui produk lokal. Dengan bersatunya kekuatan makanan tradisional yang bertumpu pada bahan makanan lokal maka terciptalah sistem ekonomi yang sangat baik yang berdampak pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertahanan



Oleh :  
Arifasno Napu, SSiT, M.Kes

dan keamanan, serta unsur lainnya guna mementaskan masalah kemiskinan dan lapangan kerja, masalah makanan gizi dan kesehatan, masalah kualitas SDM, termasuk masalah sosial.

**Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan**  
Fondasi utama sistem demokrasi Indonesiaini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, namun dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pelaksanaan MBG apakah dilaksanakan dengan tanggung jawab dan profesional?Ini merupakan taruhannya sehingga sampai-sampai pimpinan tertinggi BGN dan unsur terkait lainnya harus berurusan dengan hukum, <https://www.youtube.com/watch?v=yI6I7dcmFSQ>. Artinya bahwa kajian kebijaksanaan untuk pelaksanaan MBG hanya memikirkan sesaat tapi penting berkelanjutan bagaimana keberlangsungan program termasuk dampaknya ketika terjadi pergantian kepemimpinan nasional.

Yah, sayang sekali program MBG ini terkesan hanya memberi makan pada sasaran, bukan dibarengi peningkatan pengetahuan dan keterampilan kepada sasarnya yang berbasis potensi daerah guna memperkokoh kedaulatan Indonesia.Tentunya ini dapat diwujudkan dengan pembelajaran makanan, gizi dan kesehatan pada setiap sasaran anak sekolah yang ditata serta didasari kurikulum, <https://dinkes.gorontaloprov.go.id/anak-sekolah-indonesia-makan-gratismasalah-gizi-dan-kesehatan-meningkat/>

**Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**  
*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.* (Q.S. Al-Maa'idah : 8)  
Unsurkeadilan sosial pada program MBG sangat jelas yakni bagaimana dapat menggerakkan ekonomi

masyarakat secara terstruktur dan masif dalam mengatasi masalah kemiskinan yang berdampak pada status gizi dan kesehatan serta kualitasSDM(sumber daya manusia) Indonesia. Secara berkeadilan dapat menyeluruh dan merata pada rakyat, dan itulah yang ada dalam program MBG baik berlaku pada sasarnya anak sekolah, balita bermasalah, ibu hamil/menyusui yang KEK. Namun berkeadilan yang diperuntukkan untuk seluruh rakyat Indonesia masih tetap terus dibenahi dan sejatinya dilengkapi proses pelaksanaan dalam regulasinya.  
Seperti tidak ada proses pembelajaran makanan, gizi dan kesehatan pada sasaran MBG, akibatnya tidak sedikit yang membuang makanan atau tidak memakannya akibat sasaran belum faham begitu pentingnya makanan bergizi untuk kesehatan.Sangat diyakini bahwa ini upaya membuat rakyat menjadi tidak faham tentang eksistensi dirinya yang mengemis dan dibuat tidak sadar bahwa bangsanya itu kaya raya dengan harta benda dan intelektualnya?  
Bila dibandingkan dengan program penanganan masalah stuntingyanghanyamengedepankan publikasi dalam angka-angka dan tidak memandirikan masyarakat sementara substansi kenaikan tinggi badan generasi Indonesia belum jelas bahkan menjadi lebih pendek. Lihat hasil hasil Riset Kesehtan Dasar (Risksedas) 2018 dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023.  
Tidakberkeadilansecara mendasar adalah terciptanya masyarakat yang senang dengan pemberian bantuan. Apakah berbagai bantuanyang tidak mengedukasi merupakan skenario pembodohan dan pemiskinan bangsa Indonesia agar tetap dalam penjajahan ekonomi dan penjajahan bentuk lainnya yang membendung kemandirian masyarakat?  
Sudah ada 22.732 satuan pendidikan yang menerima MBG dengan rincian 12.647 negeri dan swasta 10.085sertapenerima manfaat ada 4.517.338 orang <https://mbg.pdm.kemendikdasmen.go.id/portal> (6/6-2026). Oleh karena itu sangat bijaksana bahwa Program MBG harus terus dilaksanakan namun agar tidak merugikan bangsa secara ilmu pengetahuan apalagi materil, maka apakah dialihkan saja program ini ke sekolah. Di sekolah program ini dilaksanakan berdasarkan kurikulum pembelajaran gizi berbasis makanan tradisional, tersedia guru yang berlatar pendidikan gizi dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan program, tersedia bangunan untuk praktik beserta peralatan praktik, diajarkan sejak PAUD, SD, SLTP dan SLTA serta sederajat tentang makanan, gizi dan kesehatan berbasis makanan tradisional daerah masing-masing yang juga dapat dimodifikasi. Bila guru yang berlatar belakang pendidikan gizi belum ada, maka guru yang terkait dan mengajar di sekolah itu dapat dilatih menjadi guru yang mengampu mata pelajaran kuliner bergizi berbasis

budaya. Tentunya terjadi pelestarian dan pengembangan budaya dari sisi konsumsi makanan, peningkatan perilaku dan pola makan yang baik, terjadi keputusan mata rantai permasalahan makanan, gizi dan kesehatan yang akhirnya berdampak pada kesehatan dan generasi secara jelas berkesinambungan, bukan sebuah kamufase. Ayo dong pak Presiden RI, sudah saatnya **melahirkan Undang-undang tentang makanan tradisional berbasis bahan pangan lokal**, sehingga Indonesia memang benar terkenal dengan kekayaan budaya yang dilestarikan dan dikembangkan sebagai nilai kedaulatan dan ketahanan Negara RI.  
Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Segalanya memberikan petunjuk kebenaran yang rasional dan ilmiah kepada Bangsa Indonesia dalam memperbaiki status gizi dan kesehatan rakyatnya termasuk masalah kemiskinan, Aamiin. (\*)  
Penulis bersedia berdiskusi untuk konstruksi MBG.  
*\*Akademisi, Pengamat Gizi dan Kesehatan, alumni Akademi Gizi Manado (sekolah kedinasan), UI, UGM dan IPB; Mengajardi Perguruan Tinggi Sejak 2001 Ilmu Gizi dan Kesehatan, Kebijakan Kesehatan, Olahraga, Budaya, Pengalaman birokrat 28 tahun (rumah sakit, Dinkes Prov, Dinsos Prov, BPBD Provinsi), Ketua Perhimpunan Pakar Gizi Dan Pangan Provinsi Gorontalo, Ketua Yayasan Makanan dan Minuman Indonesia (YAMMI) Provinsi Gorontalo, Pembina DPD PERSAGI Provinsi Gorontalo, Wakil Ketua Kwarda Gorontalo, Mengajar Di Universitas Negeri Gorontalo dan PT Swasta 2001-2020; Mengajar di Poltekkes Kemenkes Gorontalo sejak 2021-sekarang.*  
  
Pustaka:  
Al-qur'an, Kitab Suci Agama Islam.  
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. 2024. Pedoman Makan Bergizi Gratis (MBG) DI Satuan Pendidikan.  
Napu A. 2025. Yth, Jenderal (Purn TNI) Prabowo Subianto, Presiden RI, Salam Gizi! <https://dinkes.gorontaloprov.go.id/yth-jenderal-purn-tni-prabowo-subianto-presiden-ri-salam-gizi/>  
Rudatin, dkk. 2024. Standar Gizi dan Makanan Program MBG. <https://www.scribd.com/document/820550831/Pedoman-Standar-Gizi-MBG-FINAL-30-12-24>  
Napu A. 2025. Makan Bergizi Gratis Dan Masa Depan Bangsa. <https://gorontalo.kemenag.go.id/opini/makan-bergizi-gratis-dan-masa-depan-bangsa>  
Napu A. 2024. Anak Sekolah Indonesia Makan Gratis Masalah Gizi Dan Kesehatan Meningkat. <https://dinkes.gorontaloprov.go.id/anak-sekolah-indonesia-makan-gratismasalah-gizi-dan-kesehatan-meningkat/>

## HARIAN PAGI PERTAMA DAN TERBESAR DI GORONTALO

# GORONTALO Post

**Penerbit** : PT. GORONTALO CEMERLANG  
**Pembina** : Dahlan Iskhan  
**Komisaris Utama** : Imawan Mashuri  
**Komisaris** : Urief Hasan  
**Direktur Utama** : Moh. Sirham  
**Direktur** : Haryono  
**Direktur Marketing** : Hariyanto Hamzah

**Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab** : Jitro Paputungan

### DIVISI PRODUKSI

**Redaktur Pelaksana**: Roy Tilameo, Rahmat Malik.  
**Redaktur**: Zulkifli Tampolo. **Staf Redaksi**: Deice Pomalingo, Cairas Ntoma, Diyanti T. Niyode, Sekretaris Redaksi: Agustina Said. **Koordinator HRD**: Chicilia Noviatusti Arifin. **Koordinator IT**: Aslan Akuba

### DIVISI ART & PERWAJAHAN

Risdiyanto Karim, Nasir Hantono, Apri Ahmad. **Design Grafis**: Muhammad Syukri

### DIVISI USAHA

**Manager Keuangan**: Elvin Ambo. **Adriyanti Kadir (adm)**. **Manager Iklan**: Hariyanto Hamzah. **Staf Iklan**: Aminum Humola, Surya Muhamad **Design Iklan**: Oman Nasiboe.

**Manager Sirkulasi & Pemasaran**: Yusuf Saleh. **Pemasaran Koran**: Buyung Tanjung, Yersi Ismail, Welniaty Ahaya (adm).

### LAYANAN PELANGGAN DAN IKLAN

**Tarif Iklan**: Umum Rp. 30.000,-/mmk (hitam putih/BW), Rp 40.000,-mmk (berwarna/FC). **Mungil**: Rp 35.000 (satu kali muat). **Advertorial**: Rp 22.500,-mmk (berwarna), Rp 15.000,-mmk (hitam putih/BW). **Harga Langganan Koran**: Rp 150.000 (luar kota tambah ongkos kirim)

### ALAMAT

**Kantor Pusat**: GEDUNG GRAHA PENA GORONTALO  
Jln. Jhon A. Katili (Eks Jln. Andalas). No. 144 Kota Gorontalo. Telepon: (0435) 827551.  
E-mail Redaksi: redaksi\_gp@yahoo.com, redaksi.gpost@gmail.com, Hargo.co.id.  
E-mail Iklan: iklan\_gp@yahoo.com, iklangp@yahoo.com. E-mail Sirkulasi & Pemasaran: marketing\_gp@ymail.com.

**Perwakilan Jakarta**: Jln. Kebayoran Lama no. 12 Jakarta Barat.  
**Surabaya**: Jln Ketintang Permai, Blok BD No. 17, Kota Surabaya, Jawa Timur.





(FOTO ISTIMEWA)

JAJARAN Bapemperda rapat pembahasan bersama

## OPD Kesehatan Diminta Benahi Pajak Retribusi

**TILONGKABILA-GP** – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bone Bolango mulai menyusun perubahan tarif pada rumpun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kesehatan. Langkah tersebut merupakan bagian dari pembahasan Peraturan Daerah (Perda) Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang saat ini tengah dilakukan bersama OPD pengampu di lingkungan pemerintah daerah.

Meski pembahasan perubahan Perda PDRD pada prinsipnya dilakukan secara serentak dengan seluruh OPD pengampu, namun khusus untuk rumpun kesehatan pembahasannya dilaksanakan dalam pertemuan tersendiri. Langkah itu dilakukan agar seluruh kebutuhan dan usulan yang berkaitan dengan sektor kesehatan dapat dibahas lebih rinci sebelum dimasukkan dalam perda perubahan.

Dalam pembahasan tersebut, Bapemperda meminta seluruh OPD rumpun kesehatan untuk mengidentifikasi sekaligus melengkapi berbagai item pajak dan retribusi yang masih dianggap kurang atau belum terakomodasi. Item-item yang dibutuhkan tersebut akan menjadi bahan dalam penyusunan perubahan Perda PDRD, terutama untuk menyesuaikan kebutuhan layanan dan ketentuan yang berlaku saat ini.

Bapemperda menjelaskan bahwa sejumlah item yang kini diusulkan merupakan kebutuhan yang sebelumnya belum tercantum dalam perda lama. Karena itu, seluruh kekurangan akan diperbaharui dan dilengkapi dalam perda perubahan yang sedang disusun.

Untuk proses tersebut, OPD rumpun kesehatan diberikan waktu selama dua minggu guna membenahi dan melengkapi seluruh kebutuhan yang diperlukan sebelum memasuki tahapan harmonisasi. “Insya Allah kita kasih waktu 2 minggu untuk membenahi semua setelah itu kita akan harmonisasi,” ujarnya. (csr)

# Bapemperda Bahas Perubahan Perda PDRD

## Pariwisata, Pasar dan Perizinan Alami Perubahan Tarif

**TILONGKABILA-GP** – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bone Bolango kembali menggelar pertemuan bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu untuk membahas perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Pertemuan tersebut melibatkan OPD terkait, di antaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Pariwisata, serta pengelola pasar.

Ketua Bapemperda DPRD Bone Bolango, Romi Mohamad, mengatakan seluruh OPD pengampu sengaja dihimpun dalam satu forum agar pembahasan dapat berjalan lebih efektif. Menurutnya, jika pembahasan dilakukan secara terpisah dengan masing-

masing OPD, maka berpotensi memunculkan banyak usulan perubahan di waktu berbeda. Padahal, setelah perda perubahan ditetapkan, usulan perubahan berikutnya baru dapat diajukan kembali dalam kurun waktu tertentu. Karena itu, seluruh kebutuhan dan usulan dari OPD pengampu dibahas sekaligus dalam proses perubahan Perda PDRD kali ini.

Dalam pembahasan tersebut, substansi yang menjadi perhatian utama adalah perubahan tarif pada sejumlah sektor, termasuk pariwisata, pasar dan perizinan, serta penambahan item-item penting yang dibutuhkan oleh OPD pengampu. Seluruh usulan tersebut nantinya akan dimasukkan dalam perda perubahan PDRD. Romi mencontohkan adanya item tambahan yang diusulkan, seperti pajak hiburan, pajak objek wisata Danau Perintis, serta Center Point yang direncanakan masuk dalam perda baru.

Romi berharap proses penyusunan perubahan Perda PDRD dapat segera

rampung sehingga bisa dijalankan secara optimal. Menurutnya, perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan baru sekaligus memasukkan sejumlah item yang sebelumnya belum tercakup dalam perda.

Dengan adanya penyesuaian tarif dan penambahan objek pajak maupun retribusi tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bone Bolango pada masa mendatang. “karena kalau cuma kita laksanakan setiap opd maka nantinya ada kemungkinan akan banyak kali usulan perubahan sementara perda perubahan itu kalau kita sudah tetapkan maka nanti setelah 3 tahun lagi baru diusulkan makanya kita bahas semua opd pengampu apa saja yang mereka butuhkan. karena di perubahan ini dalam rangka menyesuaikan aturan baru dan menambah item yang sebelumnya tidak termasuk sehingga itu akan menambah pad kedepannya,” tutupnya. (csr)

## Saling Bergandengan, Kawal Program Pro Rakyat

**TILONGKABILA-GP** – Ketua Dewan Kabupaten Bone Bolango (Dekab Bonbol) Faisal Yunus memberi support agar kedepan penyelenggaraan pemerintahan bersama antara Eksekutif dan Legislatif bisa lebih solid.

Ini dibutuhkannya agar semua pihak bisa

saling bersama-sama mempertahankan tatanan pemerintahan daerah yang kuat dan kompak untuk mengemban tanggungjawab dan kepeduliannya dalam berpartisipasi aktif membangun daerah tercinta. Untuk membangun suatu daerah tentu butuh peran serta seluruh komponen

tak terkecuali masyarakat dan lainnya.

Karena itu ia berharap semua pihak harus saling bekerja bergandengan tangan baik dalam mengawal kebijakan dan program yang pro rakyat. “ yang jelas harus tetap bekerja bergandengan tangan, “Supportnya belum lama ini. (csr)

# Said Iqbal: Kau Boleh Kaya, Tetapi Jangan Miskinkan Kami

**JAKARTA** – Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menyatakan bakal segera memberikan laporan dan menyampaikan pandangan terkait kesejahteraan buruh kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Beberapa hal yang mungkin nanti, karena saya kan langsung memberikan laporan ke Bapak Presiden melalui koordinasi dengan Pak Mensesneg,” kata Said Iqbal menurut keterangan Sekretariat Presiden dikutip dari Jakarta, Senin (8/6/2026).

Beberapa hal yang akan dilaporkan Said kepada Presiden, salah satunya berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen.

Menurut presiden Partai Buruh itu, pertumbuhan ini harus diimbangi dengan redistribusi kekayaan yang merata, hingga kesetaraan kesempatan. “Setiap orang punya kesempatan. Kalau bahasa kami yang sederhana, kau boleh kaya, tetapi jangan miskin kami,” tutur Said kepada wartawan usai pelantikan hari ini. Kemudian, Said Iqbal memandang bahwa

ke depan kesejahteraan buruh meliputi kepastian kerja, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial.

Pandangan-pandangan tersebut, katanya, akan disampaikan kepada Presiden untuk menjadi bahan pertimbangan dalam analisa kebijakan.

Tidak hanya itu, Said Iqbal juga akan menyampaikan pandangannya terkait upah layak bagi para buruh, termasuk juga terkait pekerja buruh migran yang saat ini masih memerlukan perlindungan dari negara.

“Hal-hal ini yang akan kami

sampaikan kepada Bapak Presiden dalam bentuk saran, pendapat, gagasan, dan menganalisis kebijakan. Tentu saya akan mendatangi beberapa menteri untuk mendiskusikan,” ujarnya.

Penunjukan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden diharapkan semakin memperkuat komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta memastikan pertumbuhan ekonomi nasional memberikan

manfaat yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sebelumnya, Said Iqbal dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh dalam seremoni yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan pada hari ini. Selain Said Iqbal, turut dilantik pula Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BGN dan Mayjen TNI (Purn.) Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. (ant/jpnn)





Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026

## Wawali Gaungkan Gerakan Tanam Pohon

**GORONTALO - GP** - Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Kota Gorontalo tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga momentum memperkuat komitmen menjaga kelestarian lingkungan. Hal itu ditegaskan Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, saat memimpin apel peringatan yang berlangsung di kawasan Perumahan ASN, Selasa (9/6/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Ismail Madjid, unsur Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah, kalangan dunia usaha, serta akademisi dari Universitas Negeri Gorontalo. Dalam arahannya, Indra Gobel mengingatkan bahwa persoalan lingkungan yang kini paling mendesak dihadapi daerah bukan lagi sebatas polusi udara, melainkan meningkatnya ancaman polusi sampah yang berpotensi memicu berbagai persoalan kesehatan masyarakat.

Menurutnya, sampah yang tidak tertangani dengan baik dalam waktu singkat dapat menjadi sumber pencemaran dan berdampak langsung terhadap kualitas hidup warga. Maka dari itu, Pemerintah Kota Gorontalo terus mendorong penguatan sistem pengelolaan lingkungan yang lebih terintegrasi. Salah satu langkah yang diusulkan adalah penyusunan konsep sustainable city atau kota berkelanjutan yang melibatkan perguruan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah.

Indra menilai pembangunan kota ke depan harus didukung oleh perencanaan yang matang, mulai dari penataan drainase, sistem pemilahan sampah, hingga pengelolaan tempat pembuangan akhir yang aman dan tidak mengganggu kawasan permukiman. Ia juga menyinggung dampak perubahan iklim yang semakin nyata dirasakan masyarakat. Banjir besar yang melanda Gorontalo pada 2024, menurutnya, menjadi salah satu indikator perubahan pola cuaca yang harus diantisipasi melalui kebijakan lingkungan yang lebih serius. Untuk itu, Indra mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari budaya sehari-hari. Salah satunya melalui gerakan rutin membersihkan lingkungan yang dilaksanakan setiap hari Selasa di wilayah Kota Gorontalo.

Sebagai bentuk aksi nyata, usai apel peringatan dilakukan penanaman sejumlah pohon buah oleh Wakil Wali Kota bersama unsur Forkopimda. Pohon mangga dan rambutan dipilih sebagai simbol penghijauan sekaligus upaya meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Indra berharap gerakan menanam pohon dan menjaga kebersihan lingkungan tidak berhenti pada peringatan tahunan semata, melainkan terus tumbuh menjadi kesadaran kolektif masyarakat. "Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dimulai dari hal-hal sederhana seperti memilah sampah dari rumah, menjaga kebersihan sekitar, hingga menanam pohon untuk generasi mendatang," ujarnya. (adv)



Wawali Kota Gorontalo, Indra Gobel ketika melakukan penanaman pohon dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Selasa (9/6/2026).

BELE LI MBUI BERTRANSFORMASI JADI MPP

## Adhan: Warga Tak Perlu Lagi Keliling Kantor



Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea ketika meninjau progres proyek Revitalisasi Belle Li Mbui, Selasa (9/6/2026).

Sambut 1 Muharram 1448 H

## Pemkot Siapkan Pawai Syiar Bernuansa Religi

**GORONTALO - GP** - Pemerintah Kota Gorontalo tengah mempersiapkan pelaksanaan Pawai Hijratul Rasul sebagai rangkaian menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah.

Kegiatan yang menjadi tradisi tahunan tersebut dirancang tidak hanya sebagai perayaan pergantian tahun Hijriah, tetapi juga sebagai media dakwah dan penguatan ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat.

Melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah, berbagai persiapan teknis mulai dimatangkan. Pawai direncanakan berlangsung pada pertengahan Juni 2026 dengan melibatkan ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat.

Rumah Dinas Wali Kota Gorontalo diproyeksikan menjadi titik awal pelaksanaan kegiatan. Dari lokasi tersebut, peserta akan bergerak mengikuti rute yang nantinya ditetapkan panitia setelah mendapat persetujuan pemerintah daerah.

Kepala Bagian Kesra Kota Gorontalo, Sukamto Mooduto, menjelaskan bahwa pawai tahun ini akan dikemas lebih semarak melalui sejumlah kategori



Pawai 1 Muharram yang pernah dilaksanakan Pemkot Gorontalo.

lomba yang dapat diikuti masyarakat. Selain pawai jalan kaki atau ta'aruf, panitia juga membuka kategori kendaraan hias yang mencakup sepeda motor, bentor, dan mobil.

"Setiap peserta diberikan ruang untuk menampilkan kreativitas melalui ornamen dan dekorasi yang mengandung pesan-pesan keislaman serta semangat hijrah," ujar Sukamto.

Peserta yang akan ambil bagian berasal dari berbagai unsur, mulai dari organisasi perangkat daerah, aparat sipil negara, kecamatan dan kelurahan, hingga kalangan pelajar.

Kegiatan ini juga melibatkan majelis taklim, santri TPA dan TPQ, remaja masjid, serta organisasi kemasyarakatan Islam yang ada di Kota Gorontalo.

Untuk memberikan motivasi kepada peserta, panitia menyiapkan penghargaan bagi penampilan terbaik pada setiap kategori yang dilombakan.

Penilaian akan dilakukan oleh tim juri berdasarkan kreativitas, kesesuaian tema, dan pesan yang disampaikan dalam pawai.

Saat ini, konsep final pelaksanaan masih menunggu arahan dan persetujuan Wali Kota Gorontalo.

Meski demikian, koordinasi lintas instansi terus dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar, aman, dan menjadi momentum syiar Islam yang berkesan bagi masyarakat dalam menyambut Tahun Baru Hijriah 1448. (adv)

**GORONTALO - GP** - Gedung eks Bele Li Mbui segera memiliki wajah dan fungsi baru. Pemerintah Kota Gorontalo tengah mempersiapkan bangunan yang berada di jantung kota tersebut menjadi Mall Pelayanan Publik (MPP), pusat layanan terpadu yang akan menghadirkan berbagai urusan pemerintahan dalam satu lokasi.

Keseriusan pemerintah merealisasikan program tersebut ditunjukkan langsung oleh Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, saat meninjau progres revitalisasi bangunan pada Selasa (9/6/2026).

Dalam kunjungan itu, Adhan memastikan seluruh pekerjaan renovasi berjalan sesuai rencana agar gedung dapat segera difungsikan sebagai pusat pelayanan masyarakat yang modern, nyaman, dan mudah diakses. Menurut Adhan, kehadiran Mall Pelayanan Publik merupakan langkah strategis untuk memangkas birokrasi sekaligus memudahkan warga dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi.

"Ke depan semua pelayanan akan terpusat di sini. Masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah kantor untuk mengurus berbagai keperluan," kata Adhan.

Ia menjelaskan, bangunan yang sebelumnya menjadi aset Pemerintah Provinsi Gorontalo tersebut kini telah diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Kota Gorontalo. Setelah proses serah terima selesai, pemerintah kota langsung melakukan

pembinaan menyeluruh guna menyesuaikan fungsi gedung sebagai pusat pelayanan terpadu.

Beragam instansi dan layanan yang selama ini tersebar di sejumlah lokasi nantinya akan dihimpun dalam satu kawasan.

Mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, BPJS, layanan perhubungan, urusan keagamaan, hingga penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Konsep ini diharapkan mampu menghemat waktu dan biaya masyarakat karena seluruh kebutuhan administrasi dapat diselesaikan dalam satu kunjungan.

"Kalau ada beberapa urusan sekaligus, cukup datang ke satu tempat. Tidak perlu lagi berkeliling dari kantor ke kantor," ujarnya. Tak hanya menyediakan layanan administrasi, MPP juga akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung. Pemerintah Kota Gorontalo merencanakan keberadaan pusat pengaduan masyarakat (call center), pos pelayanan kepolisian, Command Center, hingga ambulans siaga yang dapat digunakan untuk mendukung pelayanan kepada warga.

Revitalisasi eks Bele Li Mbui menjadi Mall Pelayanan Publik diharapkan menjadi tonggak baru reformasi birokrasi di Kota Gorontalo, sekaligus menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (adv)

### POSISI KAS DAERAH PER 08 JUNI 2026

I	Posisi Saldo Kas BUD per 07 Juni 2026 :	51.329.271.715,49
-	Penerimaan Kas Daerah per 08 Juni 2026	961.186.751,66
-	Pengeluaran Kas Daerah per 08 Juni 2026	461.007.908,00
II	Saldo Akhir per 08 Juni 2026	51.829.450.559,15

Gorontalo, 09 Juni 2026

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA GORONTALO SELAKU BUD

Ttd

NURYANTO, Ak.M.Ec.Dev.CA  
PEMBINA UTAMA MUDA

**DAYA Adicipta**  
Wipasa  
Member of Daya Group

**PEX 160**

**HONDA**  
One HEART.

**BEKINGXPAN**  
NGANA PE GAYA

**Torung Honda**

**special cashback**  
**1.500.000\***

\*Syarat dan ketentuan berlaku

